

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

4.1.1 Profile Perusahaan Detik.com



Detikcom merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detikcom hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, detikcom merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru (breaking news). Sejak tanggal 3 Agustus 2011, detikcom menjadi bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan CT Corp.

Server detikcom sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai hadir dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Pada tanggal 9 Juli tersebut ditetapkan sebagai hari lahir detikcom yang didirikan Budiono Darsono (mantan wartawan Detik), Yayan Sopyan (mantan wartawan Detik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Pada awalnya peliputan utama detikcom terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Namun setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai membaik, detikcom memutuskan untuk menambahkan berita hiburan, dan olahraga

Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi detikcom (PT Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom). Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli 100% saham detikcom dengan nilai US\$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diakuisisi, jajaran direksi Detikcom diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. Dan komisaris Utama dijabat

Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung. Sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham detikcom dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di detikcom, dan sisanya dimiliki oleh Tiger 39%, dan Mitsui 2%

Pada Juli 1998 situs detikcom per-harinya menerima 30.000 hits (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 user (pelanggan Internet). Sembilan bulan kemudian, Maret 1999, hits per-harinya naik tujuh kali lipat, tepatnya rata-rata 214.000 hits per hari atau 6.420.000 hits per bulan dengan 32.000 user. Pada bulan Juni 1999, angka itu naik lagi menjadi 536.000 hits per hari dengan user mencapai 40.000. Terakhir, hits detikcom mencapai 2,5 juta lebih per harinya. Selain perhitungan hits, detikcom masih memiliki alat ukur lainnya yang sampai sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran itu adalah page view (jumlah halaman yang diakses). Page view detikcom sekarang mencapai 3 juta per harinya. sekarang detik.com menempati posisi ke tertinggi dari alexa.com untuk seluruh konten berita di Indonesia

A. Visi Detik.com

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/ mobile

B. Misi Detik.com

1. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier
3. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

4.1.2 Profile Perusahaan Kompas.com

KOMPAS

Kompas.com pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan nama Kompas Online. Kompas Online ini pada mulanya merupakan edisi internet dari harian Kompas. Kemudian tahun 1998 Kompas Online bertransformasi menjadi Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia. Ada kalanya Kompas.com mendukung pemerintahan, dan ada kalanya Kompas.com mengkritisi pemerintah yang ada.

Pada tahun 2008, 10 tahun setelah Kompas online bertransformasi menjadi Kompas.com, Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya, Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiserfriendly. Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Framing Detik.com

1. Analisis Artikel Berita 1

Judul : Warning Keras Ahli Hukum-Aktivis Jika Revisi UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Sumber : Detik.com

Tanggal : 21 Agustus 2024

Ringkasan : Constitutional and Administrative Law Society (CALs) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada.

Table 4,1 Analisis Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Warning Keras Ahli Hukum-Aktivis Jika Revisi UU Pilkada Abaikan Putusan MK
	Lead	Constitutional and Administrative Law Society (CALs) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada.
	Latar Informasi	Latar Informasi dari pemberitaan ini memberikan informasi terkait adanya peringatan keras dari para ahli hukum dan aktivis, solusi yang didapatkan adalah memastikan bahwa revisi uu

		berjalan dengan selaras dengan keputusan MK
	Kutipan Sumber	Tidak terdapat kutipan sumber pada pemberitaan ini
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Penutup dari artikel berita ini adalah Selain itu, MK juga menolak gugatan perkara 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh A Fahrur Rozi dan Antony Lee. Gugatan itu mengenai syarat usia calon kepala daerah.
Skrip	What	Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada.
	Where	Jakarta
	When	21 Agustus 2024
	Who	Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
	Why	Sebelumnya diberitakan, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
	How	Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. MK mengatakan esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan pembentuk UU

		malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Pada paragraf pertama menjelaskan bagaimana CALS mendesak pemerintah dan dpr mematuhi putusan MK
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Pada paragraf 2 sampai akhir berisikan hal hal yang diserukan oleh CALS Terdapat foto Ilustrasi Pemilu

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksi

Berita dengan Judul Warning Keras Ahli Hukum-Aktivis Jika Revisi UU Pilkada Abaikan Putusan MK Lead Constitutional and Administrative Law Society (CALs) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada. Latar Informasi Sebelumnya diberitakan, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. MK mengatakan esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan pembentuk UU malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada. Kutipan Sumber Tidak terdapat kutipan sumber pada pemberitaan ini Pernyataan Opini Penutup dari artikel berita ini adalah Selain itu, MK juga menolak gugatan perkara 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh A Fahrur Rozi dan Antony Lee. Gugatan itu mengenai syarat usia calon kepala daerah.

2. Struktur Skrip

What Constitutional and Administrative Law Society (CALs) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada. Where Jakarta When 21 Agustus 2024 Who Constitutional and Administrative Law Society (CALs) Why Sebelumnya diberitakan, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. How Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. MK mengatakan esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan pembentuk UU malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada.

3. Struktur Tematik

Pada paragraf pertama menjelaskan bagaimana CALs mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan MK. Pada paragraf 2 sampai akhir berisikan hal-hal yang diserukan oleh CALs.

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat ilustrasi foto pemilu

2. Analisis Artikel Berita 2

Judul : Partai Buruh Demo di DPR Besok, Desak DPR Tak Lawan Putusan MK soal Pilkada

Sumber : Detik.com

Tanggal : 21 Agustus 2024

Ringkasan : Partai Buruh akan menggelar demo di depan gedung DPR besok. Partai Buruh mendesak DPR tak mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pilkada.

Table 4.2 Analisis Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Partai Buruh Demo di DPR Besok, Desak DPR Tak Lawan Putusan MK soal Pilkada
	Lead	Partai Buruh akan menggelar demo di depan gedung DPR besok. Partai Buruh mendesak DPR tak mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pilkada Selain di DPR, Partai Buruh berencana menggelar aksi di depan kantor KPU pada Jumat (22/4). Tuntutannya adalah mendesak agar PKPU segera diterbitkan paling lambat 23 Agustus.
	Latar Informasi	latar informasi dari pemberitaan ini adalah mengangkat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh partai buruh untuk mendesak agar dpr tidak mengabaikan putusan MK
	Kutipan Sumber	Terdapat kutipan sumber langsung, Kutipan sumber terdapat dari tulisan di akun Partai Buruh <ol style="list-style-type: none"> 1. "Mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus 2024 sudah mengeluarkan PKPU sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024," 2. "Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024,"

	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	Penutup dari artikel ini adalah isi dari ketentuan pasal 40 yang sudah diubah
Skrip	What	Partai Buruh akan menggelar demo di depan gedung DPR besok. Partai Buruh mendesak DPR tak mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pilkada.
	Where	Jakarta
	When	21 Agustus 2024
	Who	Partai Buruh
	Why	Partai Buruh berencana menggelar aksi di depan kantor KPU pada Jumat (22/4). Tuntutannya adalah mendesak agar PKPU segera diterbitkan paling lambat 23 Agustus.
	How	"Mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus Partai buruh melakukan aksi demo di depan gedung DPR
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Pada paragraf pertama dari berita ini menjelaskan lead yang berisikan partai buruh akan menggelar demo di depan gedung dpr Pada paragraf ke dua menjelaskan bagaimana informasi disebarkan Pada paragraf ketiga dan akhir menjelaskan bagaimana ketentuan dari pasal 40 yang diubah
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto para buruh yang sedang melakukan aksi demo yang membuat pembaca memiliki gambaran dari aksi demo tersebut

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Struktur Sintaksi pada pemberitaan dengan Judul **Partai Buruh Demo di DPR Besok, Desak DPR Tak Lawan Putusan MK soal Pilkada Lead** Partai Buruh akan menggelar demo di depan gedung DPR besok. Partai Buruh mendesak DPR tak mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pilkada Selain di DPR, Partai Buruh berencana menggelar aksi di depan kantor KPU pada Jumat (22/4). Tuntutannya adalah mendesak agar PKPU segera diterbitkan paling lambat 23 Agustus. Latar Informasi latar informasi dari pemberitaan ini adalah mengangkat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh partai buruh untuk mendesak agar dpr tidak mengabaikan putusan MK Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup dari artikel ini adalah isi dari ketentuan pasal 40 yang sudah diubah.

2. Struktur Skrip

What Partai Buruh akan menggelar demo di depan gedung DPR besok. Partai Buruh mendesak DPR tak mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pilkada. Where Jakarta When 21 Agustus 2024 Who Partai Buruh Why Partai Buruh berencana menggelar aksi di depan kantor KPU pada Jumat (22/4). Tuntutannya adalah mendesak agar PKPU segera diterbitkan paling lambat 23 Agustus. "Mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus How Partai buruh melakukan aksi demo di depan gedung DPR

3. Struktur Tematik

Pada paragraf pertama dari berita ini menjelaskan lead yang berisikan partai buruh akan menggelar demo di depan gedung dpr Pada paragraf ke dua menjelaskan bagaimana informasi disebarkan Pada paragraf ketiga dan akhir menjelaskan bagaimana ketentuan dari pasal 40 yang diubah

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto para buruh yang sedang melakukan aksi demo yang membuat pembaca memiliki gambaran dari aksi demo tersebut

3. Analisis Artikel Berita 3

Judul : Pakar Hukum Unimal: Revisi UU Pilkada Harus Merujuk Putusan MK

Sumber : Detik.com

Tanggal : 21 Agustus 2024

Ringkasan : Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Amrizal J Prang menyebutkan, revisi UU tersebut harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Table 4.3 Analisis Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Pakar Hukum Unimal: Revisi UU Pilkada Harus Merujuk Putusan MK
	Lead	Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Amrizal J Prang menyebutkan, revisi UU tersebut harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
	Latar Informasi	Latar informasi pada berita ini mengangkat aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh para partai buruh di deapn DPR untuk mendesak agar tidak mengabaikan putusan MK terkait pilkada, aksi demo ini

	mencerminkan adanya ketegangan antara proses legislasi yang dijalankan oleh DPR
Kutipan Sumber	Terdapat kutipan sumber langsung, dari Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Amrizal J Prang: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Sifat putusan MK final dan mengikat sejak diputuskan, maka wajib ditindaklanjuti. Artinya terhadap pasal yang diputuskan inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat harus diubah. Jikapun tidak dilakukan perubahan, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," 2. "Tetapi jika tidak merujuk putusan MK, selain melanggar hukum dan konstitusi, ini juga berpotensi digugat atau JR (judicial review) kembali bagi pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan,"
Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
Penutup	Penutup dari artikel ini adalah isi dari ketentuan pasal 40 yang sudah diubah
What	Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Amrizal J Prang menyebutkan, revisi UU tersebut harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Where	Jakarta
When	22 Agustus 2024
Who	Badan Legislasi (Baleg)

	Why	Amrizal mengatakan, putusan MK yang mengubah syarat bagi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah (cakada) bersifat final dan mengikat sejak diputuskan. Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
	How	Dalam rapat tersebut Baleg DPR menerapkan mengikuti putusan MA terkait batas usia bakal calon kepala daerah. Serta menetapkan parpol yang tidak punya kursi di DPRD bisa mengusung bakal calon kepala daerah sendiri.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Pada paragraf pertama menjelaskan Dosen Hukum Tata Negara UNIMAL yang mengatakan bahwa keputusan MK adalah hal yang final
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Pada paragraf kedua dan selanjutnya berisikan kutipan kutipan sumber Terdapat gambar ilustrasi dari kota pemilihan KPU

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Pakar Hukum Unimal: Revisi UU Pilkada Harus Merujuk Putusan MK Lead Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Amrizal J Prang menyebutkan, revisi UU tersebut harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Latar Informasi Latar informasi pada berita ini mengangkat aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh para partai buruh di deapn DPR untuk mendesak agar tidak

mengabaikan putusan MK terkait pilkada, aksi demo ini mencerminkan adanya ketegangan antara proses legislasi yang dijalankan oleh DPR. Pernyataan Opini

Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan. Penutup Penutup dari artikel ini adalah isi dari ketentuan pasal 40 yang sudah diubah

2. Struktur Skrip

What Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Amrizal J Prang menyebutkan, revisi UU tersebut harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Where Jakarta When 22 Agustus 2024 Who Badan Legilasi (Baleg) Why Amrizal mengatakan, putusan MK yang mengubah syarat bagi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah (cakada) bersifat final dan mengikat sejak diputuskan. Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. How Dalam rapat tersebut Baleg DPR menerapkan mengikuti putusan MA terkait batas usia bakal calon kepala daerah. Serta menetapkan parpol yang tidak punya kursi di DPRD bisa mengusung bakal calon kepala daerah sendiri.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan

4. Struktur Retoris

Terdapat ilustrasi kotak kpu

4. Analisis Artikel Berita 4

Judul : Masinton Interupsi Rapat DPR soal UU Pilkada: Kita Tahu Ini untuk Siapa!

Sumber : Detik.com

Tanggal : 21 Agustus 2024

Ringkasan : Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi.

Table 4.4 Analisis Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Masinton Interupsi Rapat DPR soal UU Pilkada: Kita Tahu Ini untuk Siapa!
	Lead	Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi.
	Latar Informasi	Latar informasi dari pemberitaan ini berupa Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.
	Kutipan Sumber	Terdapat kutipan langsung dari sumber Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu: <ol style="list-style-type: none">1. "Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutuhkan kebenaran itu sendiri Pak Menteri. Biarlah forum ini Pak Menteri Mendagri, (menteri) Hukum HAM yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi,"2. "Kemarin keputusan PUU 90 pemerintah tidak merespons

apapun terhadap putusan itu dan kita pun tidak merespons itu, kemudian kemarin PUU 60 kemudian kita merespons dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa keputusan MK itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi,"

3. "Hari ini kita kemudian menyiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan UU yang kita tahu UU ini diperuntukan untuk siapa,"

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi atau Awiek

1. "Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?"

Pernyataan Opini

Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan

Penutup

Penutup dari artikel ini adalah Isi pasal yang disepakati Baleg DPR ini tidak persis sama dengan putusan MK. Pasal yang disepakati DPR ini pun membuat PDIP, partai tempat Masinton bernaung, tak bisa mengusung calon Gubernur sendiri di Jakarta.

Skrip

What

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk

		dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi.
	Where	Jakarta
	When	21 Agustus 2024
	Who	Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu
	Why	Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi. Hal ini disampaikan Masinton usai revisi UU ini disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyinggung soal mundurnya demokrasi.
	How	Masinton menyatakan pemerintah dan DPR diam saja saat ada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dia menyebut kini DPR dan pemerintah justru meniyasati putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 soal syarat parpol mengusung calon kepala daerah.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama menjelaskan bagaimana Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada
		Paragraf kedua hingga seterusnya terdapat kutipan sumber yang menunjang informasi dari berita ini
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat video wawancara dari Puan Maharani agar pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Struktur sintaksi pada artikel dengan Judul Masinton Interupsi Rapat DPR soal UU Pilkada: Kita Tahu Ini untuk Siapa! Lead Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi. Latar Informasi Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Kutipan Sumber Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu: 1. "Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri Pak Menteri. Biarlah forum ini Pak Menteri Mendagri, (menteri) Hukum HAM yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi," 2. "Kemarin keputusan PUU 90 pemerintah tidak merespons apapun terhadap putusan itu dan kita pun tidak merespons itu, kemudian kemarin PUU 60 kemudian kita merespons dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa keputusan MK itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi," 3. "Hari ini kita kemudian menyiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan UU yang kita tahu UU ini diperuntukan untuk siapa," Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi atau Awiek 1. "Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup dari artikel ini adalah Isi pasal yang disepakati Baleg DPR ini tidak persis sama dengan putusan MK. Pasal yang disepakati DPR ini pun membuat PDIP, partai tempat Masinton bernaung, tak bisa mengusung calon Gubernur sendiri di Jakarta.

2. Struktur Skrip

What Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi. Where Jakarta When 21 Agustus 2024 Who

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu Why Masinton menyebut pemerintah dan DPR menjadi saksi dan pelaku atas keburukan demokrasi. Hal ini disampaikan Masinton usai revisi UU ini disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Masinton menyinggung soal mundurnya demokrasi. How Masinton menyatakan pemerintah dan DPR diam saja saat ada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dia menyebut kini DPR dan pemerintah justru menyasati putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 soal syarat parpol mengusung calon kepala daerah.

3. Struktur Tematik

Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginterupsi rapat pengambilan keputusan terkait revisi UU Pilkada Paragraf kedua hingga seterusnya terdapat kutipan sumber yang menunjang informasi dari berita ini

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat video wawancara dari Puan Maharani agar pembaca dapat lebih mengerti isi dari berita

5. Analisis Artikel Berita 5

Judul : Ramai 'Peringatan Darurat' di Medsos, Ini Respons
Pimpinan Baleg DPR

Sumber : Detik.com

Tanggal : 21 Agustus 2024

Ringkasan : Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) merespons gerakan 'Peringatan Darurat' di media sosial usai

Revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna. Awiek mengatakan menghormati setiap pendapat yang masuk.

Table 4.5 Analisis Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Ramai 'Peringatan Darurat' di Medsos, Ini Respons Pimpinan Baleg DPR
	Lead	Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) merespons gerakan 'Peringatan Darurat' di media sosial usai Revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna. Awiek mengatakan menghormati setiap pendapat yang masuk.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini terkait dengan kekhawatiran mengenai potensi gangguan terhadap proses pemilu akibat informasi yang beredar secara tidak terkendali di media sosial. Baleg DPR memberikan respon bahwa pemilu tetap berjalan lancar dan aman
	Kutipan Sumber	Terdapat kutipan langsung, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek): <ol style="list-style-type: none"> 1. "Ya itu pendapat silakan saja kami menghormati pendapat itu, bermain di ruang media sosial silakan. Kemudian mau diskusi juga silakan, berdialog di media konvensional seperti ini juga silakan," 2. "Nanti ketika produk undang-undang itu sudah diundangkan mau digugat ke Mahkamah Konstitusi silakan tidak ada yang menghalang-halangi. Di sinilah apa, kebebasan berekspresi dijamin oleh UU," 3. "Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1

		Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Pernyataan Opini	
	Penutup	Penutup dari artikel ini merupakan kutipan dari Awiek yang mengatakan "Setuju,"
Skrip	What	Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) merespons gerakan 'Peringatan Darurat' di media sosial usai Revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna. Awiek mengatakan menghormati setiap pendapat yang masuk.
	Where	Jakarta
	When	21 Agustus 2024
	Who	Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu
	Why	Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu.
	How	Awiek mengatakan publik bisa menggugat Undang-Undang jika sudah disahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut tak ada yang dihalang-halangi.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama pada pemberitaan ini adanya respon dari baleg dpr ri terkait respon di media sosial Paragraf selanjutnya memberikan informasi dari kutipan sumber

Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto dari Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi yang sedang diwawancara untuk menjadi sebuah penekanan bagi pembaca
----------------	-----------------------------------	---

(Sumber: Okahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pemberitaan dengan judul Judul Ramai 'Peringatan Darurat' di Medsos, Ini Respons Pimpinan Baleg DPR Lead Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) merespons gerakan 'Peringatan Darurat' di media sosial usai Revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna. Awiek mengatakan menghormati setiap pendapat yang masuk. Latar Informasi Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) merespons gerakan 'Peringatan Darurat' di media sosial usai Revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna Kutipan Sumber Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek): 1. "Ya itu pendapat silakan saja kami menghormati pendapat itu, bermain di ruang media sosial silakan. Kemudian mau diskusi juga silakan, berdialog di media konvensional seperti ini juga silakan," 2. "Nanti ketika produk undang-undang itu sudah diundangkan mau digugat ke Mahkamah Konstitusi silakan tidak ada yang menghalang-halangi. Di sinilah apa, kebebasan berekspresi dijamin oleh UU," 3. "Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup Penutup dari artikel ini merupakan kutipan dari Awiek yang mengatakan "Setuju,"

2. Struktur Skrip

What Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) merespons gerakan 'Peringatan Darurat' di media sosial usai Revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna. Awiek mengatakan menghormati setiap pendapat yang masuk. Where Jakarta When 21 Agustus 2024 Who

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu Why Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu. How Awiek mengatakan publik bisa menggugat Undang-Undang jika sudah disahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut tak ada yang dihalang-halangi.

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini adanya respon dari baleg dpr ri terkait respon di media sosial Paragraf selanjutnya memberikan informasi dari kutipan sumber

6. Analisis Artikel Berita 6

Judul : Rapat Hitungan Jam di DPR Demi Sepakati Revisi UU
Pilkada

Sumber : Detik.com

Tanggal : 22 Agustus 2024

Ringkasan : Pembahasan daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada hingga disepakati Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah hanya berlangsung hitungan jam. RUU Pilkada akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk sepakati menjadi UU.

Table 4.6 Analisis Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Rapat Hitungan Jam di DPR Demi Sepakati Revisi UU Pilkada
	Lead	Pembahasan daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang

		<p>(RUU) Pilkada hingga disepakati Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah hanya berlangsung hitungan jam. RUU Pilkada akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk sepakati menjadi UU.</p>
<p>Latar Informasi</p>		<p>Latar informasi pada pemberitaan ini yang membahas tentang rapat intensif di DPR untuk menyepakati revisi uu pilkada, beberapa fraksi di DPR mendukung perubahan ini, namun proses yang berlangsung cepat dan tanpa banyak disukusi mendalam ini mendapatkan kritikan</p>
<p>Kutipan Sumber</p>		<p>Kutipan sumber langsung Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidowi atau Awiek.</p>
<p>Pernyataan Opini</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. "Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" 2. "Setuju,"
<p>Penutup</p>		<p>Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan</p>
<p>Skrip</p>	<p>What</p>	<p>Penutup dari artikel terdapat kalimat Kemudian, salah satu yang disepakati dalam rapat ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat partai politik untuk mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai tanpa kursi DPRD.</p>
		<p>Pembahasan daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada hingga disepakati Baleg DPR bersama DPD dan</p>

		pemerintah hanya berlangsung hitungan jam. RUU Pilkada akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk sepakati menjadi UU.
	Where	Jakarta
	When	22 Agustus 2024
	Who	Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidowi atau Awiek.
	Why	Baleg DPR menyepakati RUU Pilkada mengatur batas usia cagub-cawagub minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk cawalkot-cawawalkot merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA). Cagub-cawagub minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk cawalkot-cawawalkot terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.
	How	Delapan fraksi di DPR menyepakati RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna. Sementara itu, hanya Fraksi PDIP yang menyatakan menolak RUU Pilkada.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama pada pemberitaan ini merupakan pembahasan daftar inventarisir revisi uu pilkada hingga disepakati baleg dpr Paragraf kedua merupakan informasi terkait rapat yang dilakukan Paragraf tiga dan selanjutnya merupakan informasi terkait pemberitaan ini serta terdapat kutipan sumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat 2 foto dari rapat yang dilakukan oleh Baleg DPR membahas RUU Pilkada yang

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Struktur Sintaksi pada berita dengan judul Rapat Hitungan Jam di DPR Demi Sepakati Revisi UU Pilkada Lead Pembahasan daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada hingga disepakati Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah hanya berlangsung hitungan jam. RUU Pilkada akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk sepakati menjadi UU. Latar Informasi Rapat pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR berakhir sekitar pukul 16.55 WIB. Artinya, rapat RUU Pilkada berjalan sekitar 7 jam hingga akhirnya disepakati mayoritas fraksi DPR, pemerintah, dan DPD. Berdasarkan agenda rapat paripurna DPR yang diterima, DPR akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (22/8). Agenda rapat paripurna tersebut adalah mengambil keputusan tingkat II atau persetujuan RUU Pilkada. Baleg DPR menyepakati RUU Pilkada mengatur batas usia cagub-cawagub minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk cawalkot-cawawalkot merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA). Cagub-cawagub minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk cawalkot-cawawalkot terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Latar informasi pada pemberitaan ini yang membahas tentang rapat intensif di DPR untuk menyepakati revisi uu pilkada, beberapa fraksi di DPR mendukung perubahan ini, namun proses yang berlangsung cepat dan tanpa banyak disukusi mendalam ini mendapatkan kritikan Kutipan Sumber Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidowi atau Awiek. 1. "Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" 2. "Setuju," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup dari artikel terdapat kalimat Kemudian, salah satu yang disepakati dalam rapat ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

mengubah syarat partai politik untuk mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai tanpa kursi DPRD.

2. Struktur Skrip

Skrip What Pembahasan daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada hingga disepakati Baleg DPR bersama DPD dan pemerintah hanya berlangsung hitungan jam. RUU Pilkada akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk sepakati menjadi UU. Where Jakarta When 22 Agustus 2024 Who Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidowi atau Awiek. Why Baleg DPR menyepakati RUU Pilkada mengatur batas usia cagub-cawagub minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk cawalkot-cawawalkot merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA). Cagub-cawagub minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk cawalkot-cawawalkot terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. How Delapan fraksi di DPR menyepakati RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna. Sementara itu, hanya Fraksi PDIP yang menyatakan menolak RUU Pilkada.

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini merupakan pembahasan daftar inventarisir revisi uu pilkada hingga disepakati baleg dpr Paragraf kedua merupakan informasi terkait rapat yang dilakukan Paragraf tiga dan selanjutnya merupakan informasi terkait pemberitaan ini serta terdapat kutipan sumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat 2 foto dari rapat yang dilakukan oleh Baleg DPR membahas RUU Pilkada yang berguna menjadi penekanan berita bagi pembaca

7. Analisis Artikel Berita 7

Judul : Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Puan Kunker ke Hungaria dan Serbia

Sumber : Detik.com

Tanggal : 22 Agustus 2024

Ringkasan : DPR RI menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada hari ini. Ketua DPR Puan Maharani disebut sedang menjalankan kegiatan di luar negeri.

Table 4.7 Analisis Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Puan Kunker ke Hungaria dan Serbia
	Lead	DPR RI menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada hari ini. Ketua DPR Puan Maharani disebut sedang menjalankan kegiatan di luar negeri.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini tentang pengesahan ruu pilkada di dpr dengan kehadiran Puan Maharani yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Hungaria dan Serbia, menggambarkan dinamika penting dalam proses legislasi tanpa ketidak hadiran pimpinan DPR
	Kutipan Sumber	Terdapat kutipan langsung, Sekjen DPR Indra Iskandar: 1. "Bu Ketua DPR sedang menghadiri undangan resmi parlemen Hongaria dan Serbia," 2. "Mulai jalan kemarin akan bertemu ketua parlemen kedua negara tersebut,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
Penutup	Penutup dari artikel terdapat kalimat Revisi UU tersebut menuai gelombang penolakan dan aksi-aksi. Sebanyak 3.286 personel kepolisian melakukan	

Skrip	What	pengamanan di sejumlah titik terkait demo di depan gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Patung Kuda, hingga KPU RI.
	Where When Who Why	DPR RI menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada hari ini. Ketua DPR Puan Maharani disebut sedang menjalankan kegiatan di luar negeri. Jakarta 22 Agustus 2024 Ketua DPR Puan Maharani Indra mengatakan Puan telah terbang ke Hongaria dan Serbia. Dia menyebut Puan akan melakukan pertemuan dengan ketua parlemen dua negara tersebut.
Tematik	How Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	"Bu Ketua DPR sedang menghadiri undangan resmi parlemen Hongaria dan Serbia," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Pada paragraph pertama pemberitaan ini menginformasikan adanya revisi undang-undang namun puan maharani tidak menghadiri rapat tersebut. Pada paragraph kedua terdapat kutipan dari sekjen dpr Paragraph ketiga dan selanjutnya terdapat kutipan informasi serta informasi terkait pemberitaan ini Terdapat 1 foto Puan Maharani dan 1 Video rapat paripurna yang berguna untuk pembaca artikel
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	

(Sumber: Olahan Penelitian,2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Struktur Sintaksi dengan Judul Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Puan Kunker ke Hungaria dan Serbia Lead DPR RI menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada hari ini. Ketua DPR Puan Maharani disebut sedang menjalankan kegiatan di luar negeri. Latar Informasi Untuk diketahui, DPR RI menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. Dalam rapat paripurna itu, DPR RI menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada menjadi UU. Revisi UU tersebut menuai gelombang penolakan dan aksi-aksi. Sebanyak 3.286 personel kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik terkait demo di depan gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Patung Kuda, hingga KPU RI. Latar informasi pada pemberitaan ini tentang pengesahan ruu pilkada di dpr dengan kehadiran Puan Maharani yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Hungaria dan Serbia, menggambarkan dinamika penting dalam proses legislasi tanpa ketidakhadiran pimpinan DPR. Kutipan Sumber Sekjen DPR Indra Iskandar: 1. "Bu Ketua DPR sedang menghadiri undangan resmi parlemen Hongaria dan Serbia," 2. "Mulai jalan kemarin akan bertemu ketua parlemen kedua negara tersebut," Pernyataan Opini

Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup Penutup dari artikel terdapat kalimat Revisi UU tersebut menuai gelombang penolakan dan aksi-aksi. Sebanyak 3.286 personel kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik terkait demo di depan gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Patung Kuda, hingga KPU RI.

2. Struktur Skrip

What DPR RI menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada hari ini. Ketua DPR Puan Maharani disebut sedang menjalankan kegiatan di luar negeri. Where Jakarta

When 22 Agustus 2024 Who Ketua DPR Puan Maharani Why Indra mengatakan Puan telah terbang ke Hongaria dan Serbia. Dia menyebut Puan akan melakukan pertemuan dengan ketua parlemen dua negara tersebut. How "Bu Ketua DPR sedang menghadiri undangan resmi parlemen Hongaria dan Serbia," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan,

3. Struktur Tematik

pemberitaan ini menginformasikan adanya revisi undang-undang namun puan maharani tidak menghadiri rapat tersebut. Pada paragraph kedua terdapat kutipan dari sekjen dpr Paragraph ketiga dan selanjutnya terdapat kutipan informasi serta informasi terkait pemberitaan ini

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat 1 foto Puan Maharani dan 1 Video rapat paripurna yang berguna untuk pembaca artikel ini agar mendapatkan pesan lebih jelas lagi

8. Analisis Artikel Berita 8

Judul : Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda

Sumber : Detik.com

Tanggal : 22 Agustus 2024

Ringkasan : Rapat paripurna DPR RI ditunda hari ini. Penundaan pengesahan Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau revisi UU Pilkada menjadi Undang-Undang, karena kuota forum tak kunjung tercapai.

Table 4.8 Analisis Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda
	Lead	Rapat paripurna DPR RI ditunda hari ini. Penundaan pengesahan

	Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau revisi UU Pilkada menjadi Undang-Undang, karena kuota forum tak kunjung tercapai.
Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini Ada sejumlah perubahan pasal dalam UU Pilkada. Baleg DPR sepakat usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan seperti putusan Mahkamah Agung terhadap PKPU, bukan saat penetapan seperti penegasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terhadap gugatan UU Pilkada
Kutipan Sumber	Terdapat kutipan langsung, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Pernyataan Opini	1. "89 Hadir, izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
Penutup	Hal ini berbeda dengan putusan MK yang menyamaratakan perhitungan suara partai tanpa memandang ada tidaknya kursi di DPRD. ebanyak 8 fraksi di DPR menyetujui keputusan itu. Massa dari Partai Buruh mulai berdatangan ke depan gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk melakukan demonstrasi mendesak DPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Partai Buruh
Skrip	What

		merupakan pemohon yang gugatannya terkait UU Pilkada dikabulkan MK.
	Where	Jakarta
	When	22 Agustus 2024
	Who	Partai Buruh
	Why	massa Partai Buruh datang membawa satu mobil komando. Mereka juga terlihat membawa spanduk hingga poster berisi protes terhadap DPR.
	How	Sebagaimana diketahui, Baleg DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi UU Pilkada ke paripurna hari ini kemarin. Revisi itu disebut dalam waktu sehari sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto rapat paripurna DPR RI ditunda 30 menit

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda Lead Rapat paripurna DPR RI ditunda hari ini. Penundaan pengesahan Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau revisi UU Pilkada menjadi Undang-Undang, karena kuota forum tak kunjung tercapai. Latar Informasi Ada sejumlah perubahan pasal dalam UU Pilkada. Baleg DPR sepakat usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan seperti putusan Mahkamah Agung terhadap PKPU, bukan saat penetapan seperti

penegasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terhadap gugatan UU Pilkada Kutipan Sumber Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad 1. "89 Hadir, izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup Hal ini berbeda dengan putusan MK yang menyamaratakan perhitungan suara partai tanpa memandang ada tidaknya kursi di DPRD. ebanyak 8 fraksi di DPR menyetujui keputusan itu.

2. Struktur Skrip

What Massa dari Partai Buruh mulai berdatangan ke depan gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk melakukan demonstrasi mendesak DPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Partai Buruh merupakan pemohon yang gugatannya terkait UU Pilkada dikabulkan MK. Where Jakarta When 22 Agustus 2024 Who Partai Buruh Why massa Partai Buruh datang membawa satu mobil komando. Mereka juga terlihat membawa spanduk hingga poster berisi protes terhadap DPR..

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan

4. Struktur Retoris

Terdapat foto rapat paripurna DPR RI ditunda 30 menit

9. Analisis Artikel Berita 9

Judul : Alerta! BEM SI Desak DPR Temui Demonstran dan Janji Patuhi Putusan MK

Sumber : Detik.com

Tanggal : 22 Agustus 2024

Ringkasan : Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut berunjuk rasa ke depan Gedung DPR RI. BEM SI mendesak DPR menemui mereka dan berjanji mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada.

Table 4.9 Analisis Berita 9

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Alerta! BEM SI Desak DPR Temui Demonstran dan Janji Patuhi Putusan MK
	Lead	Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut berunjuk rasa ke depan Gedung DPR RI. BEM SI mendesak DPR menemui mereka dan berjanji mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberita BEM SI menyiarkan seruannya dengan tajuk 'Selamatkan Indonesia, Seruan Aksi Kawal Putusan MK', memusatkan aksinya di Gedung DPR, Jakarta,
	Kutipan Sumber Pernyataan Opini	Tidak terdapat kutipan sumber Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	Penutup pada artikel ini BEM SI memperkirakan massa mereka sekitar 500 sampai 1.000 orang. Mereka menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kerusuhan, maka mahasiswa akan mengevakuasi diri ke kawasan TVRI, letaknya tidak terlalu jauh dari gedung DPR.
Skrip	What	Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut berunjuk rasa ke depan Gedung DPR RI. BEM SI mendesak DPR menemui mereka dan berjanji mematuhi putusan

		Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada.
	Where	Jakarta
	When	22 Agustus 2024
	Who	BEM SI
	Why	Sebagaimana diketahui, ada dua putusan MK yang diketok hakim konstitusi pada Selasa (20/8) lalu. Ada Putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang membuka peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon di Pilkada tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD melainkan berdasarkan persentase suara (baik dari parpol DPRD maupun non-DPRD) sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing daerah. Ada pula putusan MK Nomor 70/PUU-XXI/2024 mengenai syarat usia calon di Pilkada yang ditentukan pada saat penetapan calon, bukan pelantikan.
	How	evisi Undang-Undang Pilkada bergulir di DPR. Ada risiko, dua putusan MK di atas dimentahkan DPR lewat pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada. Maka mahasiswa, termasuk BEM SI, turun ke jalan mencegah hal itu terjadi.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto BEM SI yang sedang melakukan aksi demo yang bertujuan untuk

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada struktur sintaksi dengan Judul Alerta! BEM SI Desak DPR Temui Demonstran dan Janji Patuhi Putusan MK Lead Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut berunjuk rasa ke depan Gedung DPR RI. BEM SI mendesak DPR menemui mereka dan berjanji mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. Latar Informasi BEM SI menyiarkan seruannya dengan tajuk 'Selamatkan Indonesia, Seruan Aksi Kawal Putusan MK', memusatkan aksinya di Gedung DPR, Jakarta, Kutipan Sumber Tidak terdapat kutipan sumber Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup Penutup pada artikel ini BEM SI memperkirakan massa mereka sekitar 500 sampai 1.000 orang. Mereka menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kerusuhan, maka mahasiswa akan mengevakuasi diri ke kawasan TVRI, letaknya tidak terlalu jauh dari gedung DPR.

2. Struktur Skrip

What Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut berunjuk rasa ke depan Gedung DPR RI. BEM SI mendesak DPR menemui mereka dan berjanji mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. Where Jakarta When 22 Agustus 2024 Who BEM SI Why Sebagaimana diketahui, ada dua putusan MK yang diketok hakim konstitusi pada Selasa (20/8) lalu. Ada Putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang membuka peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon di Pilkada tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD melainkan berdasarkan persentase suara (baik dari parpol DPRD maupun non-DPRD) sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing daerah. Ada pula putusan MK Nomor 70/PUU-XXI/2024 mengenai syarat usia calon di Pilkada yang ditentukan pada saat penetapan calon, bukan pelantikan. How revisi Undang-Undang Pilkada bergulir di DPR. Ada risiko, dua putusan MK

di atas dimentahkan DPR lewat pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada. Maka mahasiswa, termasuk BEM SI, turun ke jalan mencegah hal itu terjadi.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto BEM SI yang sedang melakukan aksi demo yang bertujuan untuk memberikan gambaran pada pembaca

10. Analisis Artikel Berita 10

Judul : Dihujat Netizen, Raffi Ahmad Ngaku Dukung Putusan MK

Sumber : Detik.com

Tanggal : 24 Agustus 2024

Ringkasan : Artis Raffi Ahmad buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen di media sosial saat ramai demo kawal putusan MK. Artis yang dikenal dekat dengan keluarga Jokowi ini mengaku dukung putusan MK.

Table 4.10 Analisis Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Dihujat Netizen, Raffi Ahmad Ngaku Dukung Putusan MK
	Lead	rtis Raffi Ahmad buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen di media sosial saat ramai demo kawal putusan MK. Artis yang dikenal dekat dengan keluarga Jokowi ini mengaku dukung putusan MK.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini Suami Nagita Slavina itu juga menyuarakan agar semua pihak tetap mengawal isu yang saat ini

	<p>sedang menjadi perbincangan. Ia juga menghargai orang-orang sudah bersuara dan turun ke jalan sebagai kepedulian terhadap nasib bangsa</p>
<p>Kutipan Sumber</p>	<p>Terdapat kutipan langsung dar Rafi Ahmad</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. "Assalamualaikum wr wb Dengan Segala Hormat Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Terhadap problematika yg sedang berjalan, saya secara personal mendukung dan mengawal bagaimana keputusan MK," 3. "Saya sangat menghargai kepada teman2 yg sudah bersuara turun ke jalan Temen2 semua luar biasa atas Support dan kepedulian terhadap Bangsa yang kita cintai ini , Mari kita terus menyuarakan dan kawal ini dengan cara kita masing" ... baik menyuarakan langsung, turun ke jalan Ataupun dari lewat media sosial, dan cara cara lainnya yang baik dan bijaksana tanpa anarkis dan provokatif ... saya yakin apapun yang kita lakukan memiliki tujuan yang sama yaitu demi keutuhan NKRI dan martabat demokrasi," 4. "Semua untuk kebaikan Bangsa Indonesia ... Semua demi kejayaan Bangsa Indonesia.... Kita bergerak bersama Rakyat Indonesia,"
<p>Pernyataan Opini</p>	<p>Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan</p>
<p>Penutup</p>	<p>Penutup pada artikel ini Saat banyaknya demonstran yang menyuarakan suaranya di depan gedung DPR RI, Raffi Ahmad diketahui lagi ada di Bandung. Dia bersama dengan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Buruh dan Gelora," ujar Dasco.</p>

Skrip	What	Artis Raffi Ahmad buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen di media sosial saat ramai demo kawal putusan MK. Artis yang dikenal dekat dengan keluarga Jokowi ini mengaku dukung putusan MK.
	Where	Jakarta
	When	24 Agustus 2024
	Who	Rafi Ahmad
	Why	Seperti diketahui Raffi Ahmad menjadi bully-an netizen sejak kemarin, lantaran tidak mau peduli dengan demo yang menolak revisi UU Pilkada. Tak hanya itu, dalam Instagram miliknya banyak netizen yang kecewa dengan sikap Raffi Ahmad. Bahkan ada yang meng-unfollow media sosial miliknya.
	How	Saat banyaknya demonstran yang menyuarakan suaranya di depan gedung DPR RI, Raffi Ahmad diketahui lagi ada di Bandung. Dia bersama dengan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama pada pemberitaan ini memberikan informasi terkait rafi ahmad yang buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen
		Paragraph kedua dan selanjutnya merupakan informasi dan kutipan sumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Raffi Ahmad

(Sumber: Olahan Penelitian,2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Dihujat Netizen, Raffi Ahmad Ngaku Dukung Putusan MK Lead rtis Raffi Ahmad buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen di media sosial saat ramai demo kawal putusan MK. Artis yang dikenal dekat dengan keluarga Jokowi ini mengaku dukung putusan MK. Latar Informasi Suami Nagita Slavina itu juga menyuarakan agar semua pihak tetap mengawal isu yang saat ini sedang menjadi perbincangan. Ia juga menghargai orang-orang sudah bersuara dan turun ke jalan sebagai kepedulian terhadap nasib bangsa Kutipan Sumber Rafi Ahmad 1. "Assalamualaikum wr wb Dengan Segala Hormat Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Terhadap problematika yg sedang berjalan, saya secara personal mendukung dan mengawal bagaimana keputusan MK," 2.

"Saya sangat menghargai kepada teman2 yg sudah bersuara turun ke jalan Temen2 semua luar biasa atas Support dan kepedulian terhadap Bangsa yang kita cintai ini , Mari kita terus menyuarakan dan kawal ini dengan cara kita masing" ... baik menyuarakan langsung, turun ke jalan Ataupun dari lewat media sosial, dan cara cara lainnya yang baik dan bijaksana tanpa anarkis dan provokatif ... saya yakin apapun yang kita lakukan memiliki tujuan yang sama yaitu demi keutuhan NKRI dan martabat demokrasi," 3. "Semua untuk kebaikan Bangsa Indonesia ... Semua demi kejayaan Bangsa Indonesia.... Kita bergerak bersama Rakyat Indonesia," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup

Penutup pada artikel ini Saat banyaknya demonstran yang menyuarakan suaranya di depan gedung DPR RI, Raffi Ahmad diketahui lagi ada di Bandung. Dia bersama dengan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Buruh dan Gelora," ujar Dasco.

2. Struktur Skrip

What Artis Raffi Ahmad buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen di media sosial saat ramai demo kawal putusan MK. Artis yang dikenal dekat dengan keluarga Jokowi ini mengaku dukung putusan MK. Where Jakarta When 24 Agustus 2024 Who Rafi Ahmad Why Seperti diketahui Raffi Ahmad menjadi bully-

an netizen sejak kemarin, lantaran tidak mau peduli dengan demo yang menolak revisi UU Pilkada. Tak hanya itu, dalam Instagram miliknya banyak netizen yang kecewa dengan sikap Raffi Ahmad. Bahkan ada yang meng-unfollow media sosial miliknya. HowSaat banyaknya demonstran yang menyuarakan suaranya di depan gedung DPR RI, Raffi Ahmad diketahui lagi ada di Bandung. Dia bersama dengan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan..

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini memberikan informasi terkait rafi ahmad yang buka suara setelah jadi sasaran hujatan netizen Paragraph kedua dan selanjutnya merupakan informasi dan kutipan sumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Rafi Ahmad

4.2.2 Analisis Framing Kompas.com

1. Analisis Artikel Berita 11

Judul : DPR Dinilai Korupsi Konstitusi jika Sahkan Revisi UU Pilkada

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 22 Agustus 2024

Ringkasan : Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menyebut, tindakan DPR RI yang menjegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk "korupsi konstitusi".

Table 4.11 Analisis Berita 11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	DPR Dinilai Korupsi Konstitusi jika Sahkan Revisi UU Pilkada

<p>Lead</p>	<p>Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah kabar revisi Undang-undang (UU) Pilkada akan disahkan secara diam-diam. Dia menyebut proses revisi sejatinya sudah dilaksanakan secara terbuka.</p>
<p>Latar Informasi</p>	<p>Latar informasi pada pemberitaan ini membahas pernyataan kritis terhadap revisi uu pilkada menyoroti kontroversi terkait perubahan yang diusulkan terhadap uu pilkada 2024, menanggapi kritik ini, dpr melalui beberapa anggotanya membela keputusan tersebut dengan argumen bahwa revisi ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi</p>
<p>Kutipan Sumber</p>	<p>Terdapat kutipan langsung, Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Hal tersebut merupakan bentuk korupsi pada tatanan konstitusi yang berpotensi menciptakan krisis hukum di masa depan," 2. "Tidak menaati putusan MK adalah bentuk pembangkangan dan pengkhianatan pada konstitusi," 3. "Membahayakan kedaulatan hukum," 4. "(Untuk menggalang upaya penyelamatan demokrasi dan konstitusi,"
<p>Pernyataan Opini</p>	<p>Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan</p>
<p>Penutup</p>	<p>Penutup pada artikel ini adalah Pihak yang disebut mengundang pemerintah dalam rapat di DPR ini adalah Wakil Ketua DPR RI</p>

Skrip	What	<p>dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.</p> <p>Putri Presiden ke-4 Abdurrahaman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menyebut, tindakan DPR RI yang menjegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk "korupsi konstitusi".</p>
	Where	Jakarta
	When	22 Agustus 2024
	Who	<p>Putri Presiden ke-4 Abdurrahaman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid</p>
	Why	<p>Adapun putusan itu memerintahkan agar ambang batas pencalonan atau threshold Pilkada diturunkan dan dihitung sesuai jumlah daftar pemilih tetap setiap daerah. Namun, DPR justru mendadak membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mementahkan putusan MK, alih-alih melaksanakan putusan itu.</p>
	How	<p>Mereka menyampaikan kesimpulan untuk membawa RUU Pilkada ke pembahasan selanjutnya dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah. Pihak yang disebut mengundang pemerintah dalam rapat di DPR ini adalah Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.</p>
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf pertama pada pemberitaan ini menjelaskan Alissa wahid mengatakan bahwa</p>

		hal yang dilakukan seperti menjeggal keputusan mk adalah bentuk korupsi konstitusi
		Paragraf kedua menjelaskan bahwa putusan itu memerintahkan batas pencalonan dihitung sesuai jumlah daftar pemilih
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Paragraf ketiga dan selanjutnya terdapat kutipan dari sumber Terdapat foto Gedung dpr yang menjadi Gambaran bagi pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian,2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Berita dengan judul Judul DPR Dinilai Korupsi Konstitusi jika Sahkan Revisi UU Pilkada Lead Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah kabar revisi Undang-undang (UU) Pilkada akan disahkan secara diam-diam. Dia menyebut proses revisi sejatinya sudah dilaksanakan secara terbuka. Latar Informasi Menurutny, semua pihak, baik tingkat pemerintah, legislatif, maupun masyarakat harus menjalankan putusan MK tanpa menempuh upaya lain. Alissa meminta para elite dan ketua umum partai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan negara. Kutipan Sumber Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid: 1. "Hal tersebut merupakan bentuk korupsi pada tatanan konstitusi yang berpotensi menciptakan krisis hukum di masa depan," 2. "Tidak menaati putusan MK adalah bentuk pembangkangan dan pengkhianatan pada konstitusi," 3. "Membahayakn kedaulatan hukum," 4. "(Untuk menggalang) upaya penyelamatan demokrasi dan konstitusi," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup pada artikel ini adalah Pihak yang disebut mengundang pemerintah dalam rapat di DPR ini adalah Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

2. Struktur Skrip

What Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menyebut, tindakan DPR RI yang menjegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk "korupsi konstitusi". Where Jakarta When 22 Agustus 2024 Who Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid Why Adapun putusan itu memerintahkan agar ambang batas pencalonan atau treshold Pilkada diturunkan dan dihitung sesuai jumlah daftar pemilih tetap setiap daerah. Namun, DPR justru mendadak membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mementahkan putusan MK, alih-alih melaksanakan putusan itu. How Mereka menyampaikan kesimpulan untuk membawa RUU Pilkada ke pembahasan selanjutnya dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah. Pihak yang disebut mengundang pemerintah dalam rapat di DPR ini adalah Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

3. Struktur Tematik

pemberitaan ini menjelaskan Alissa wahid mengatakan bahwa hal yang dilakukan seperti menjegal keputusan mk adalah bentuk korupsi konstitusi Paragraf kedua menjelaskan bahwa putusan itu memerintahkan batas pencalonan dihitung sesuai jumlah daftar pemilih Paragraf ketiga dan selanjutnya terdapat kutipan dari sumber

4. Struktur Retoris

Temati Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan

2. Analisis Artikel Berita 12

Judul : Undangan Rapat Bahas Revisi Pilkada Diteken Sufmi Dasco

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa DPR tidak melanggar peraturan dalam konteks proses melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Table 4.12 Analisis Berita 12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Undangan Rapat Bahas Revisi Pilkada Diteken Sufmi Dasco
	Lead	Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada pada Rabu (21/8/2024) rupanya diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini membahas mengenai kritik terhadap revisi uu pilkada di dpr, dengan menyoroti kontroversi terkait usulan perubahan yang dianggap bisa merusak prinsip dasar konstitusi Indonesia
	Kutipan Sumber	Terdapat kutipan langsung, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: <ol style="list-style-type: none">1. "Pertama-tama tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah dapat bersama-sama hadir di ruangan ini untuk dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan undangan dari DPR RI no. B/9825/LG01.02/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024,"2. "Rapat kerja badan legislasi DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM serta pimpinan DPD RI seesai dengan surat wakil ketua DPR RI no.B/9825/LG01.02/08/2024

tertanggal 20 Agustus 2024
Hal undangan rapat kerja
terkait pembahasan RUU
Tentang perubahan keempat
UU No.1 tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu No. 1
tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati,
Walikota menjadi UU,"

Anggota Badan Legislasi DPR Yandri
Susanto

3. "Kita enggak mungkin
menganulir MK, kita ingin
menyadur itu biar terang
benderang, tidak ada tafsir
yang liar, oleh
penyelenggara KPU maupun
pasangan calon yang ingin
berkontestasi di Pilkada.
Inilah redaksinya, titik
komanya, kalimat per
kalimatnya itu mesti kita
sadur dalam UU Pilkada,"

Tidak terdapat pernyataan opini dari
wartawan

Pernyataan Opini

Penutup

Penutup pada artikel ini merupakan
kutipan dari Anggota Badan Legislatif
DPR Yandri Susanto

"Kita enggak mungkin menganulir
MK, kita ingin menyadur itu biar
terang benderang, tidak ada tafsir yang
liar, oleh penyelenggara KPU maupun
pasangan calon yang ingin
berkontestasi di Pilkada. Inilah
redaksinya, titik komanya, kalimat per
kalimatnya itu mesti kita sadur dalam
UU Pilkada,"

Skrip

What

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg)
DPR bersama pemerintah dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yang
membahas revisi Undang-Undang
Pilkada pada Rabu (21/8/2024)
rupanya diinisiasi oleh Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Where

Jakarta

When

21 Agustus 2024

Who

Sufmi Dasco Ahmad

Why

Dalam rapat ini, terungkap bahwa
pihak yang mengundang pemerintah

		<p>untuk hadir dalam rapat tersebut adalah Dasco. Awalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan syukur karena rapat untuk membahas revisi UU Pilkada ini dapat terselenggara.</p> <p>Rapat kerja akan digelar pada Rabu pukul 10.00 WIB, dilanjutkan rapat panitia kerja pembahasan revisi UU Pilkada pada pukul 13.00 WIB, dan akan diputuskan pada Rabu pukul 19.00 WIB. Anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada.</p>
	How	<p>Paragraf pertama pada pemberitaan ini menjelaskan adanya rapat kerja baleg dpr yang akan membahas revisi uu pilkada</p> <p>Paragraf kedua menjelaskan pihak terungkap mengundang pemerintah untuk hadir</p> <p>Paragraf ketiga dan selanjutnya merupakan kutipan sumber serta informasi terkait pemberitaan ini</p> <p>Terdapat foto Tangkapan layar surat undangan dari pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad kepada pemerintah untuk menghadiri rapat kerja Badan Legislat</p>
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Undangan Rapat Bahas Revisi Pilkada Diteken Sufmi Dasco Lead
Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada pada Rabu (21/8/2024) rupanya diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Latar Informasi Dalam rapat ini, terungkap bahwa pihak yang mengundang pemerintah untuk hadir dalam rapat tersebut adalah Dasco. Awalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan syukur karena rapat untuk membahas revisi UU Pilkada ini dapat terselenggara. Kutipan Sumber Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: 1. "Pertama-tama tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah dapat bersama-sama hadir di ruangan ini untuk dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan undangan dari DPR RI no. B/9825/LG01.02/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024," 2. "Rapat kerja badan legislasi DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM serta pimpinan DPD RI sesuai dengan surat wakil ketua DPR RI no.B/9825/LG01.02/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 Hal undangan rapat kerja terkait pembahasan RUU Tentang perubahan keempat UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU," Anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto 3. "Kita enggak mungkin menganulir MK, kita ingin menyadur itu biar terang benderang, tidak ada tafsir yang liar, oleh penyelenggara KPU maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada. Inilah redaksinya, titik komanya, kalimat per kalimatnya itu mesti kita sadur dalam UU Pilkada," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup Penutup pada artikel ini merupakan kutipan dari Anggota Badan Legislatif DPR Yandri Susanto "Kita enggak mungkin menganulir MK, kita ingin menyadur itu biar terang benderang, tidak ada tafsir yang liar, oleh penyelenggara KPU maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada. Inilah redaksinya, titik komanya, kalimat per kalimatnya itu mesti kita sadur dalam UU Pilkada,"

2. Struktur Skrip

What Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada pada Rabu (21/8/2024) rupanya diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Where Jakarta When 21 Agustus 2024 Who Sufmi Dasco Ahmad

Why Dalam rapat ini, terungkap bahwa pihak yang mengundang pemerintah untuk hadir dalam rapat tersebut adalah Dasco. Awalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan syukur karena rapat untuk membahas revisi UU Pilkada ini dapat terselenggara. How Rapat kerja akan digelar pada Rabu pukul 10.00 WIB, dilanjutkan rapat panitia kerja pembahasan revisi UU Pilkada pada pukul 13.00 WIB, dan akan diputuskan pada Rabu pukul 19.00 WIB. Anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada.

3. Struktur Tematik

menjelaskan adanya rapat kerja baleg dpr yang akan membahas revisi uu pilkada Paragraf kedua menjelaskan pihak terungkap mengundang pemerintah untuk hadir Paragraf ketiga dan selanjutnya merupakan kutipan sumber serta informasi terkait pemberitaan ini

4. Struktur Retoris

Terdapat foto Tangkapan layar surat undangan dari pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad kepada pemerintah untuk menghadiri rapat kerja Badan Legislat

3. Analisis Artikel Berita 13

Judul : Jokowi Disebut Intervensi Revisi UU Pilkada demi
Kaesang, Ini Respons Istana

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya enggan menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo mengintervensi revisi Undang-Undang (UU) Pilkada demi meloloskan putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi calon di pilkada.

Table 4.13 Analisis Berita 13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
-------------------	-----------------	------------------

Sintaksi	Judul	Jokowi Disebut Intervensi Revisi UU Pilkada demi Kaesang, Ini Respons Istana
	Lead	Artikel dimulai dengan menyampaikan klaim bahwa Presiden Jokowi diduga terlibat dalam intervensi terkait revisi Undang-Undang Pilkada demi kepentingan pribadi anaknya, Kaesang Pangarep, yang mungkin maju dalam Pilkada. Istana memberikan respons terhadap tuduhan tersebut.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini merupakan informasi terkait revisi Undang-Undang Pilkada, bagaimana proses politik ini berlangsung, dan kritik dari beberapa pihak yang menyebut adanya potensi konflik kepentingan yang melibatkan Presiden Jokowi dan keluarga.
	Kutipan Sumber	<p>Terdapat kutipan langsung, dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kita tidak mau menanggapi rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor," 2. "Tentu ada pertimbangan sendiri. Apapun itu pertimbangannya kita hormati. Apa yang menjadi dasar pertimbangan mereka Tentu kita harus hormati," 3. "Yang jelas begitu tidak ada undang-undang baru misalnya, atau ada undang-undang baru, maka yang diikuti oleh pemerintah adalah aturan yang berlaku. Begitu," 4. "Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong,"

	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	Penutupan artikel berisi kesimpulan mengenai respons dari pihak Istana terhadap tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada intervensi yang dimaksudkan demi kepentingan keluarga Presiden.
Skrip	What	Jokowi dituduh mengintervensi revisi UU Pilkada demi kepentingan anaknya, Kaesang. Istana memberi respons tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
	Where	Jakarta
	When	22 Agustus 2024
	Who	Presiden Jokowi
	Why	Tuduhan intervensi muncul sebagai bagian dari diskursus politik mengenai potensi pencalonan Kaesang di Pilkada, dan revisi UU Pilkada sebagai alat untuk meraih tujuan tersebut.
	How	Istana membantah tuduhan dengan menyatakan bahwa revisi UU Pilkada dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan untuk menguntungkan keluarga Jokowi
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama pada pemberitaan ini pihaknya enggan menanggapi isu yang menyebutkan presiden mengintervensi revisi undang undang
		Paragraph kedua dan ketiga terdapat informasi serta kutipan sumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto kepala kantor komunikasi kepresidenan hasan

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Analisis sintaksis menunjukkan bahwa artikel ini menyusun informasi dengan cara yang menonjolkan tuduhan terhadap Jokowi, namun dengan memberikan ruang bagi respons dari Istana. Judul yang langsung menyebutkan dugaan intervensi dan kaitannya dengan Kaesang memberikan kesan negatif terhadap pemerintah sejak awal. Lead memfokuskan perhatian pada kontroversi, dan meskipun latar informasi menjelaskan tujuan reformasi, adanya kutipan sumber yang bersifat kritis menguatkan framing bahwa ada motif pribadi di balik kebijakan tersebut. Pernyataan opini yang diberikan oleh Istana berusaha membantah tuduhan ini, namun penutupan artikel tidak sepenuhnya menutupi potensi kecurigaan publik, meninggalkan kesan ambigu. Secara keseluruhan, sintaksis artikel ini membingkai pembaca untuk lebih memfokuskan perhatian pada dugaan konflik kepentingan, meskipun ada upaya untuk mengontraskan perspektif.

2. Struktur Skrip

What: Tuduhan bahwa revisi UU Pilkada dimotivasi oleh kepentingan pribadi Jokowi untuk mendukung pencalonan Kaesang. **Who:** Artikel ini melibatkan Presiden Jokowi, Kaesang, Istana, politisi oposisi, dan anggota DPR yang kritis terhadap kebijakan ini. **When:** Peristiwa ini terkait dengan pembahasan UU Pilkada pada Agustus 2024, ketika perhatian terhadap pencalonan Kaesang semakin meningkat. **Where:** Artikel ini diunggah di media nasional Indonesia, Kompas, yang menyajikan isu ini dalam konteks politik domestik. **Why:** Tuduhan muncul karena ada kecurigaan bahwa revisi UU Pilkada akan memberikan keuntungan bagi Kaesang dalam proses Pilkada, sementara Istana berargumen bahwa perubahan ini demi perbaikan demokrasi lokal. **How:** Artikel menjelaskan proses revisi UU yang melibatkan pemerintah dan DPR, diikuti dengan bantahan

dari Istana yang menegaskan bahwa revisi tersebut tidak terkait dengan kepentingan keluarga Jokowi.

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini pihaknya enggan menanggapi isu yang menyebutkan presiden mengintervensi revisi undang-undang Paragraph kedua dan ketiga terdapat informasi serta kutipan sumber

4. Struktur Retoris

Terdapat foto kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Hasbi yang berguna sebagai penekanan pada berita.

4. Analisis Artikel Berita 14

- **Judul** : Hamid Awaluddin: Prabowo Sangat Marah Ada Manuver Revisi UU Pilkada
- **Sumber** : Kompas.com
- **Tanggal** : 23 Agustus 2024
- **Ringkasan** : Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sangat marah atas adanya manuver revisi Undang-Undang (UU) Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Table 4.14 Analisis Berita 14

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Hamid Awaluddin: Prabowo Sangat Marah Ada Manuver Revisi UU Pilkada
	Lead	Artikel dimulai dengan mengutip pernyataan Hamid Awaluddin, yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto sangat marah dengan adanya manuver politik terkait revisi UU Pilkada. Ini menandakan bahwa ada ketegangan politik yang melibatkan Prabowo dan

Latar Informasi

beberapa pihak lainnya dalam konteks perubahan tersebut.

Latar informasi pada pemberitaan ini menjelaskan bahwa Prabowo Subianto, sebagai tokoh penting dalam politik Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra, merasa keberatan dengan adanya manuver politik yang dianggapnya sebagai upaya yang tidak transparan atau bertujuan untuk kepentingan politik tertentu terkait Pilkada.

Terdapat kutipan langsung, Hamid Awaluddin

Kutipan Sumber

1. "Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik (badan),"

2. "Tentu Anda bertanya? Kenapa ya? Kalau memang cerita itu benar, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya dia tidak mau (revisi UU Pilkada) jadi beban ke depan,"

3. "Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong."

Pernyataan Opini

Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan

Penutup

Penutupan artikel berisi penegasan tentang ketegangan yang terjadi dalam politik Indonesia, serta bagaimana para tokoh seperti Prabowo merespons manuver politik yang berhubungan dengan Pilkada. Artikel menutup dengan tidak memberikan solusi, tetapi lebih menekankan pada eskalasi ketegangan politik.

Skrip	<p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Revisi UU Pilkada yang dianggap sebagai manuver politik oleh Prabowo, yang merasa marah atas upaya ini.</p> <p>Jakarta</p> <p>23 Agustus 2024</p> <p>Hamid Awaluddin</p> <p>Prabowo marah karena merasa bahwa revisi UU Pilkada ini melibatkan manuver politik yang merugikan partainya dan tidak jelas tujuannya.</p> <p>Prabowo merespons dengan ketegangan, yang disampaikan oleh Hamid Awaluddin, sebagai reaksi terhadap apa yang ia anggap sebagai langkah yang tidak transparan.</p>
Tematik	<p>Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<p>Paragraf pertama pada pemberitaan ini menjelaskan kemarahan dari presiden terpilih Prabowo subianto</p> <p>Paragraf kedua informasi terkait kemenhukum</p> <p>Paragraph ketiga dan selanjutnya merupakan kutipan sumber dan informasi tambahan</p>
Retoris	<p>Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik</p>	<p>Terdapat foto dosen fakultas hukum Universitas Hassanudin yang berguna sebagai penekanan berita</p>

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Framing sintaksis dalam artikel ini menekankan pada ketegangan politik antara tokoh-tokoh besar Indonesia, terutama Prabowo Subianto dan pihak yang mendukung revisi UU Pilkada. Judul langsung menghadirkan unsur konflik dengan

mengutip pernyataan dari Hamid Awaluddin yang menyebutkan kemarahan Prabowo. Ini memberi kesan bahwa masalah ini lebih bersifat emosional dan pribadi, ketimbang sekadar isu politik biasa.

2. Struktur Skrip

What: Revisi UU Pilkada yang melibatkan manuver politik, dengan Prabowo merasa marah karena melihatnya sebagai langkah yang merugikan partainya dan tidak transparan. **Who:** Tokoh-tokoh yang terlibat adalah Prabowo Subianto, Hamid Awaluddin, serta pihak yang mendukung revisi UU Pilkada. Peran mereka dalam artikel lebih ditekankan pada persepsi pribadi terhadap kebijakan tersebut. **When:** Peristiwa ini terjadi pada 23 Agustus 2024, ketika ketegangan politik semakin meningkat dalam konteks pembahasan revisi UU Pilkada. **Where:** Artikel ini merujuk pada situasi politik Indonesia yang terpusat di tingkat nasional, khususnya terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan DPR. **Why:** Prabowo marah karena ia melihat revisi UU Pilkada ini sebagai manuver yang tidak transparan dan mungkin lebih menguntungkan pihak lain, merugikan kepentingan politiknya. **How:** Artikel ini menggambarkan bagaimana kemarahan Prabowo dan ketegangan dalam politik dapat mempengaruhi dinamika pembahasan UU Pilkada, dengan Hamid Awaluddin sebagai pihak yang menyampaikan perasaan Prabowo.

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini menjelaskan kemarahan dari presiden terpilih Prabowo subinato Paragraf kedua informasi terkait kemenhukam Paragraph ketiga dan selanjutnya merupakan kutipan sumber dan informasi tambahan

4. Struktur Retoris

Terdapat foto dosen fakultas hukum Universitas Hassanudin yang berguna sebagai penekanan berita

5. Analisis Artikel Berita 15

Judul : Ketika Habiburokhman Disoraki hingga Ditimpuki Botol dalam Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Beberapa kejadian tak menyenangkan menimpa Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman. Hal itu terjadi dalam aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI

Table 4.15 Analisis Berita 15

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Hamid Awaluddin: Prabowo Sangat Marah Ada Manuver Revisi UU Pilkada
	Lead	Artikel dimulai dengan menyampaikan peristiwa yang mengguncang perhatian publik: Habiburokhman, seorang politisi dari Partai Gerindra, disoraki dan bahkan ditimpuki botol oleh peserta demo yang menentang kebijakan atau tindakannya. Fokus pada peristiwa ini langsung menarik perhatian pada konfrontasi fisik dan emosional.
	Latar Informasi	Latar informasi pada pemberitaan ini menjelaskan bahwa Habiburokhman menghadiri aksi protes yang digelar oleh kelompok yang menentang kebijakan tertentu. Konteks di balik peristiwa ini adalah ketegangan antara elit politik dan masyarakat, serta ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial.
	Kutipan Sumber	Tidak terdapat kutipan sumber

	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	Artikel ditutup dengan mencatat bahwa meskipun ada insiden tersebut, Habiburokhman berusaha tetap tenang dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi. Penutupan ini memberi kesan bahwa meskipun situasinya tegang, perdebatan ini adalah hal yang alami dalam politik.
Skrip	What	Habiburokhman disoraki dan ditimpuki botol oleh peserta demo yang menentang kebijakan atau tindakannya.
	Where	Jakarta
	When	23 Agustus 2024
	Who	Habiburokhma
	Why	Peserta demo tidak setuju dengan kebijakan atau tindakan tertentu dari Habiburokhman yang dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan kepentingan publik.
	How	Habiburokhman menghadiri aksi protes dan bertemu langsung dengan massa yang menentang kebijakannya. Keributan terjadi ketika massa menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara yang lebih emosional dan fisik, seperti sorakan dan melemparkan botol.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama pada pemberitaan ini menjelaskan bagaimana pemberitaan dapat terjadi Paragraph kedua dan ketiga merupakan informasi terkait berita

Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pengumuman kepada demonstran bahwa DPR tidak akan merevisi UU Pilkada
----------------	-----------------------------------	--

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Framing sintaksis dalam artikel ini memusatkan perhatian pada konfrontasi fisik dan emosional antara Habiburokhman, seorang politisi dari Partai Gerindra, dengan para peserta demo yang menentangnya. Artikel dibuka dengan judul dramatis yang langsung menggambarkan insiden tersebut—"disoraki hingga ditimpuki botol"—untuk menekankan ketegangan dan perlawanan yang sangat emosional. Lead artikel menegaskan hal ini dengan menggambarkan reaksi fisik massa, menciptakan kesan bahwa ini bukan hanya protes biasa, tetapi sebuah benturan yang sangat intens. Latar informasi memberikan penjelasan terkait konteks demo tersebut, yaitu ketidakpuasan terhadap kebijakan atau tindakan politik yang diambil oleh Habiburokhman. Kutipan sumber yang digunakan memberikan pandangan langsung dari Habiburokhman yang menanggapi insiden tersebut, memberikan pembaca gambaran bahwa meskipun dia diserang secara fisik, dia tetap tenang. Pernyataan opini menambah kedalaman dengan menonjolkan dua sisi: mereka yang menganggap demo itu sebagai ekspresi frustrasi rakyat dan mereka yang membela kebebasan berbicara sebagai bagian dari demokrasi. Artikel diakhiri dengan penutupan yang menekankan bahwa meskipun ada kekerasan, ini bagian dari dinamika demokrasi, meninggalkan kesan bahwa ketegangan tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam politik.

2. Struktur Skrip

What Habiburokhman disoraki dan ditimpuki botol oleh peserta demo yang menentang kebijakan atau tindakannya. Where Jakarta When 23 Agustus 2024 Who Habiburokhma Why Peserta demo tidak setuju dengan kebijakan atau

tindakan tertentu dari Habiburokhman yang dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan kepentingan publik. How Habiburokhman menghadiri aksi protes dan bertemu langsung dengan massa yang menentang kebijakannya. Kericuhan terjadi ketika massa menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara yang lebih emosional dan fisik, seperti sorakan dan melemparkan botol.

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini menjelaskan bagaimana pemberitaan dapat terjadi Paragraph kedua dan ketiga merupakan informasi terkait berita

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pengumuman kepada demonstran bahwa DPR tidak akan merevisi UU Pilkada

6. Analisis Artikel Berita 16

Judul : Sederet Artis yang Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada di Gedung DPR

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Bersama para mahasiswa, sejumlah komika hingga aktor ikut demo penolakan revisi Undang Undang Pilkada di depan Gedung DPR.

Table 4.16 Analisis Berita 16

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Sederet Artis yang Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada di Gedung DPR
	Lead	Artikel dibuka dengan penekanan bahwa sejumlah artis terkemuka ikut dalam aksi demonstrasi untuk menentang revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang sedang dibahas di Gedung DPR. Lead ini langsung menyebutkan

	<p>Latar Informasi</p> <p>Kutipan Sumber</p> <p>Pernyataan Opini</p> <p>Penutup</p>	<p>tokoh yang terlibat, yakni artis, yang memberi kesan bahwa aksi protes ini sangat menarik perhatian publik.</p> <p>Latar informasi pada pemberitaan ini memberikan konteks mengenai revisi UU Pilkada yang sedang dibahas di DPR, yang dianggap kontroversial oleh sejumlah kelompok, termasuk artis. Artikel ini juga menyoroti alasan mengapa revisi ini dianggap berbahaya bagi demokrasi dan menurunkan kualitas pemilihan langsung.</p> <p>Terdapat kutipan langsung dari abdur rasyad</p> <p>1. “Jangan berharap kami lucu di atas mobil ini, karena yang lucu itu ada di dalam sana (DPR). Kita berkumpul, mohon maaf jika bapak ibu mengalami kemacetan, tapi kita mau pastikan demokrasi itu tidak macet 5 tahun ke depan.”</p> <p>Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan</p> <p>Artikel ditutup dengan menyoroti komitmen artis-artis ini dalam menuntut agar revisi UU Pilkada tidak disetujui, menegaskan bahwa meskipun mereka selebritas, mereka tetap memiliki hak untuk bersuara dalam masalah-masalah penting bagi masyarakat. Penutupan ini mempertegas bahwa aksi protes ini adalah bagian dari kewajiban sosial mereka.</p> <p>Sejumlah artis terkemuka turun ke jalan untuk menolak revisi UU Pilkada yang sedang dibahas di Gedung DPR.</p> <p>Jakarta</p>
<p>Skrip</p>	<p>What</p> <p>Where</p>	

	When	23 Agustus 2024
	Who	Artis-artis Indonesia seperti Sandy Aulia, Ratu Felisha, dan lainnya, yang ikut dalam aksi demonstrasi tersebut.
	Why	Artis-artis ini merasa bahwa revisi UU Pilkada dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah langsung yang dianggap lebih demokratis dan transparan.
	How	Para artis ini berpartisipasi dalam demonstrasi dengan turun ke jalan bersama masyarakat dan kelompok lainnya yang menolak revisi UU Pilkada, menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui orasi dan tanda protes.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf pertama pada pemberitaan ini memberikan informasi adanya para komika yang ikut demo
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Paragraph kedua dan ketiga berisikan informasi serta kutipan dari narasumber Terdapat foto Sejumlah Komika mengikuti aksi demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR RI sebagai penekanan pada pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Artikel ini mengedepankan konflik sosial yang melibatkan artis dan politik. Dengan judul yang langsung mengarah pada tindakan artis yang turun ke jalan, lead artikel memberikan informasi langsung mengenai aksi protes tersebut. Hal ini

memberikan kesan bahwa ini bukan sekadar masalah kebijakan, tetapi juga isu besar yang menyentuh banyak pihak, termasuk publik yang mungkin tidak terlibat langsung dalam politik. Latar informasi memberikan gambaran mengenai alasan penolakan revisi UU Pilkada, menekankan bahwa revisi ini dianggap akan merusak demokrasi di Indonesia. Kutipan sumber dari artis memberikan perspektif langsung tentang motivasi mereka untuk terlibat dalam protes. Pernyataan opini dalam artikel memberikan sudut pandang kritis mengenai peran artis dalam politik, baik yang mendukung maupun yang menentang. Artikel ini ditutup dengan menekankan bahwa meskipun artis terkenal, mereka juga punya hak untuk menyuarakan pendapat terkait isu nasional yang krusial.

2. Struktur Skrip

What Artis-artis Indonesia turun ke jalan menentang revisi UU Pilkada, dengan aksi protes yang diadakan di depan Gedung DPR. Who Sejumlah artis ternama seperti Sandy Aulia dan Ratu Felisha yang tergabung dalam aksi protes untuk menentang kebijakan tersebut. When 23 Agustus 2024, tanggal ketika aksi protes berlangsung di Jakarta. Where Aksi demo terjadi di Gedung DPR Jakarta, yang merupakan lokasi simbolis untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah. Why Artis-artis ini menentang revisi UU Pilkada karena mereka melihat adanya potensi penurunan kualitas demokrasi dan mengurangi keberagaman politik dalam pilkada. How Para artis bergabung dengan demonstran lain, berorasi, dan menggelar aksi di jalan, dengan tujuan untuk menekan DPR agar membatalkan revisi tersebut. Kesimpulan Skrip: Artikel ini membongkar peristiwa dengan menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan mengapa aksi ini penting, menyoroti konteks politik Indonesia terkait revisi UU Pilkada. Cara mereka menyuarakan ketidaksetujuan dengan cara demonstrasi juga memperlihatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.

3. Struktur Tematik

Paragraf pertama pada pemberitaan ini memberikan informasi adanya para komika yang ikut demo Paragraph kedua dan ketiga berisikan informasi serta kutipan dari narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Sejumlah Komika mengikuti aksi demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR RI sebagai penekanan pada pembaca.

7. Analisis Artikel Berita 17

Judul : Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI
Memanas Setelah Massa Bobol Pagar

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Demonstrasi penolakan RUU Pilkada di Gedung MPR/DPR RI memanass ketika massa berhasil membobol pagar trali besi di gerbang utama.

Table 4.17 Analisis Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI Memanas Setelah Massa Bobol Pagar
	Lead	Demo massa yang awalnya berjalan damai, tetapi berubah menjadi memanass setelah massa mendekati gedung DPR.
	Latar Informasi	Memberikan latar belakang tentang penolakan terhadap revisi UU Pilkada, yang dianggap merusak demokrasi.
	Kutipan Sumber	Kutipan dari massa yang menentang revisi UU Pilkada, serta dari pihak kepolisian tentang bagaimana mereka mengatasi kericuhan.
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
Penutup	Penutupan menunjukkan bahwa meskipun kericuhan sempat terjadi, demo masih terus	

		berlanjut di berbagai tempat. Penutupan ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan, protes terus berlanjut, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Skrip	<p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Aksi protes massa yang menentang revisi UU Pilkada yang dianggap merusak demokrasi.</p> <p>Jakarta</p> <p>23 Agustus 2024</p> <p>Massa demonstran yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, dengan beberapa di antaranya mengutuk kebijakan pemerintah.</p> <p>Massa menolak revisi UU Pilkada karena menganggap kebijakan ini akan merusak kualitas demokrasi, mengurangi keberagaman politik, dan mengancam pilkada langsung.</p> <p>Massa melakukan demo di depan gedung DPR dan berusaha mendekati gedung DPR, yang menyebabkan ketegangan dan keributan yang harus ditangani oleh aparat kepolisian.</p>
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Peran Demokrasi dan Revisi UU Pilkada Artikel ini membahas bagaimana revisi UU Pilkada dapat mengancam demokrasi Indonesia, di mana pemilihan langsung dianggap sebagai fondasi demokrasi yang adil dan bebas dari intervensi. Konflik Sosial dan Ketegangan</p> <p>Aksi protes yang memanas menggambarkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah dalam</p>

Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan Terdapat foto Massa aksi sempat bentrok dengan aparat kepolisian sebagai gambaran bagi pembaca
----------------	-----------------------------------	--

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Secara sintaksis, artikel ini memanfaatkan struktur naratif yang menggambarkan dinamika konflik sosial yang terjadi dalam aksi demo. Judul artikel yang menyebutkan "memanas" sudah memberi petunjuk tentang ketegangan yang terjadi dalam peristiwa tersebut, memberi kesan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar protes biasa, tetapi melibatkan kericuhan yang berpotensi besar. Lead artikel menguatkan hal ini dengan menggambarkan transisi dari aksi yang awalnya damai menjadi kericuhan setelah massa mencoba mendekati gedung DPR. Latar informasi kemudian memberikan konteks mengapa aksi tersebut terjadi, yaitu penolakan terhadap revisi UU Pilkada, yang dianggap dapat merusak demokrasi. Hal ini mengarahkan pembaca untuk melihat protes sebagai respons terhadap kebijakan yang berpotensi mengurangi transparansi dalam politik Indonesia. Selain itu, kutipan dari massa yang menentang revisi menunjukkan bagaimana perasaan kecewa terhadap kebijakan ini dirasakan oleh banyak pihak. Sementara itu, kutipan dari aparat keamanan memperlihatkan bagaimana mereka berusaha mengendalikan situasi yang mulai memanas, menciptakan kontras antara aktivisme masyarakat dan tindakan aparat keamanan. Di akhir artikel, meskipun aksi kericuhan sempat terjadi, penutupan artikel menunjukkan bahwa demo terus berlanjut, menandakan bahwa isu revisi UU Pilkada masih menjadi topik besar yang terus diperdebatkan.

2. Struktur Skrip

Dalam hal Skrip (5W+1H), artikel dengan jelas menjelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa ini, yaitu massa demonstran yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah, serta aparat kepolisian yang berusaha mengamankan situasi. Artikel ini juga menjelaskan

dengan rinci apa yang terjadi, yaitu protes terhadap revisi UU Pilkada, yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan politik. Waktu peristiwa yang terjadi pada 23 Agustus 2024 dan lokasi di Gedung DPR Jakarta memberikan kerangka waktu dan ruang yang jelas, mengindikasikan bahwa demo ini terjadi dalam konteks protes politik besar. Alasan mengapa demo tersebut terjadi dijelaskan dalam artikel, yaitu sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi, dengan klaim bahwa revisi UU Pilkada akan mengurangi transparansi politik dan kualitas pemilihan langsung. Cara peristiwa tersebut berlangsung dijelaskan dengan mengungkapkan kericuhan yang terjadi dan upaya aparat untuk mengendalikan massa, mengarah pada gambaran bahwa peristiwa ini melibatkan ketegangan sosial yang besar.

3. Struktur Tematik

Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat. Peran Demokrasi dan Revisi UU Pilkada Artikel ini membahas bagaimana revisi UU Pilkada dapat mengancam demokrasi Indonesia, di mana pemilihan langsung dianggap sebagai fondasi demokrasi yang adil dan bebas dari intervensi. Konflik Sosial dan Ketegangan Aksi protes yang memanas menggambarkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Massa aksi sempat bentrok dengan aparat kepolisian sebagai gambaran bagi pembaca

8. Analisis Artikel Berita 18

Judul : Belum Tentu Batal, Revisi UU Pilkada Berpeluang

Dilanjutkan DPR Periode 2024-2029

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpeluang dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029.

Table 4.18 Analisis Berita 18

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Belum Tentu Batal, Revisi UU Pilkada Berpeluang Dilanjutkan DPR Periode 2024-2029
	Lead	Revisi Undang-Undang Pilkada yang sempat terhenti pada periode sebelumnya kini berpeluang dilanjutkan oleh DPR pada periode 2024.
	Latar Informasi	Menggambarkan latar belakang bahwa revisi UU Pilkada sebelumnya terhenti dan ada potensi kelanjutan pembahasan pada periode DPR 2024. Ditekankan juga tantangan yang mungkin dihadapi dalam prosesnya.
	Kutipan Sumber	Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco 1. "Mungkin akan di periode depan (revisi UU Pilkada) karena kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna," 2. "Ada gugatan parlemen threshold (ambang batas parlemen) dari Perludem yang perlu diakomodir,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	Artikel ditutup dengan menyatakan bahwa meskipun ada ketidakpastian, revisi UU Pilkada tetap berpeluang dilanjutkan, bergantung pada situasi politik dan keputusan DPR. Framing Penutup Penutupan ini memberi kesan bahwa meskipun terdapat ketidakpastian, ada peluang dan harapan bahwa revisi akan tetap

Skrip

What

dilanjutkan. Menciptakan kesan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Revisi UU Pilkada yang sempat terhenti berpeluang dilanjutkan pada periode DPR 2024.

Where

Jakarta

When

23 Agustus 2024

Who

DPR, khususnya Komisi II, serta fraksi-fraksi yang mendukung revisi UU Pilkada.

Why

Untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem Pilkada yang dianggap masih memiliki kekurangan dan meningkatkan kualitas demokrasi.

How

Revisi dapat dilanjutkan jika mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, meskipun ada tantangan politik dan dinamika internal.

Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat

Tema utama adalah kelanjutan atau penghentian revisi UU Pilkada. Terkandung juga tema kedua tentang dinamika politik di DPR yang mempengaruhi keputusan revisi tersebut.

Framing Tematik Tema ketidakpastian yang ditekankan pada judul dan lead memperlihatkan bahwa keputusan revisi UU Pilkada akan dipengaruhi oleh faktor politik, dan ini memberi kesan bahwa prospek revisi sangat bergantung pada keadaan politik saat itu.

Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik

Penggunaan frasa "belum tentu batal" dan "berpeluang dilanjutkan" berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara optimisme dan realitas ketidakpastian. Artikel secara

retoris memperkenalkan kemungkinan lanjutan sambil mempertahankan kesan bahwa situasi ini bergantung pada perkembangan selanjutnya. Framing Retoris Penyampaian narasi yang menciptakan ambiguitas, tetapi juga memberikan harapan, mengajak pembaca untuk terus mengikuti perkembangan berita ini tanpa memberikan kepastian yang tegas.

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul ini menyiratkan adanya ketidakpastian dan potensi peluang yang bertentangan. Framing yang digunakan dalam judul ini mengarah pada ketidakpastian ("belum tentu batal") namun juga memberikan harapan ("berpeluang dilanjutkan"). Melalui pilihan kata ini, pembaca diberikan gambaran bahwa meskipun ada potensi pembatalan, masih ada ruang bagi kelanjutan revisi UU Pilkada. Kata "berpeluang" lebih memberi konotasi optimisme dan memberi penekanan bahwa isu ini belum sepenuhnya ditutup. Framing semacam ini mempengaruhi persepsi pembaca bahwa keputusan akhir masih bergantung pada dinamika lebih lanjut. Lead (Pembuka): Di bagian pembuka, artikel ini mengungkapkan bahwa meskipun sempat diprediksi akan batal, revisi UU Pilkada masih memiliki peluang untuk dilanjutkan dalam periode DPR 2024. Framing ini menekankan ketidakpastian yang berkembang di tingkat kebijakan dan menggambarkan adanya pergeseran dari prediksi awal yang pesimistis ke peluang yang lebih terbuka. Lead ini juga memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan perdebatan politik yang terjadi dalam isu ini. Latar Informasi: Latar informasi di dalam artikel menyebutkan penyebab mengapa pembahasan revisi UU Pilkada sempat dihentikan, yakni penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan ketidaksepakatan internal di DPR. Dalam framing ini, penyebab eksternal dan

internal (seperti LSM dan fraksi-fraksi DPR) digambarkan sebagai faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Framing ini mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa revisi UU Pilkada tidak hanya tergantung pada keputusan internal DPR, tetapi juga pada tekanan dari luar yang bisa mempengaruhi kebijakan legislatif. Kutipan Sumber: Salah satu kutipan penting dalam artikel ini datang dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, yang menyatakan bahwa revisi UU Pilkada masih berpeluang dilanjutkan. Framing di sini memperkenalkan perspektif dari sumber yang memiliki otoritas politik, yang memberikan legitimasi terhadap peluang kelanjutan pembahasan. Hal ini berfungsi untuk memperkuat klaim bahwa meskipun ada ketidakpastian, revisi UU Pilkada mungkin masih akan dilanjutkan dengan dukungan dari beberapa fraksi di DPR. Pernyataan Opini: Artikel ini juga mencakup pernyataan opini yang menunjukkan adanya skeptisisme terhadap urgensi revisi UU Pilkada, meskipun ada pihak yang mendukungnya. Framing opini ini menggambarkan adanya ketegangan antara pihak-pihak yang mendukung revisi untuk perbaikan sistem Pilkada dan mereka yang meragukan manfaatnya. Pendapat yang bertentangan ini menguatkan gambaran bahwa revisi UU Pilkada adalah isu yang sangat dipengaruhi oleh berbagai pandangan dan kepentingan politik, menciptakan ketegangan dalam pengambilan keputusan. Penutup: Penutupan artikel ini menekankan bahwa meskipun masih ada ketidakpastian, peluang revisi UU Pilkada untuk dilanjutkan tetap terbuka, tergantung pada dinamika politik yang berkembang. Framing di sini mengarahkan pembaca untuk menyimpulkan bahwa meskipun situasinya tidak jelas, ruang untuk kelanjutan revisi tetap ada. Pembaca dibawa untuk menunggu perkembangan lebih lanjut, yang menciptakan ketegangan di akhir artikel, menjaga perhatian mereka terhadap isu ini.

2. Struktur Skrip

What Revisi UU Pilkada yang sempat terhenti berpeluang dilanjutkan pada periode DPR 2024. Where Jakarta When 23 Agustus 2024 Who DPR, khususnya Komisi II, serta fraksi-fraksi yang mendukung revisi UU Pilkada. Why Untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem Pilkada yang dianggap masih memiliki kekurangan dan meningkatkan kualitas demokrasi. How Revisi

dapat dilanjutkan jika mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, meskipun ada tantangan politik dan dinamika internal. Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Tema utama adalah kelanjutan atau penghentian revisi UU Pilkada. Terkandung juga tema kedua tentang dinamika politik di DPR yang mempengaruhi keputusan revisi tersebut. Framing Tematik Tema ketidakpastian yang ditekankan pada judul dan lead memperlihatkan bahwa keputusan revisi UU Pilkada akan dipengaruhi oleh faktor politik, dan ini memberi kesan bahwa prospek revisi sangat bergantung pada keadaan politik saat itu.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Tema utama adalah kelanjutan atau penghentian revisi UU Pilkada. Terkandung juga tema kedua tentang dinamika politik di DPR yang mempengaruhi keputusan revisi tersebut. Framing Tematik Tema ketidakpastian yang ditekankan pada judul dan lead memperlihatkan bahwa keputusan revisi UU Pilkada akan dipengaruhi oleh faktor politik, dan ini memberi kesan bahwa prospek revisi sangat bergantung pada keadaan politik saat itu.

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Penggunaan frasa "belum tentu batal" dan "berpeluang dilanjutkan" berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara optimisme dan realitas ketidakpastian. Artikel secara retoris memperkenalkan kemungkinan lanjutan sambil mempertahankan kesan bahwa situasi ini bergantung pada perkembangan selanjutnya. Framing Retoris Penyampaian narasi yang menciptakan ambiguitas, tetapi juga memberikan harapan, mengajak pembaca untuk terus mengikuti perkembangan berita ini tanpa memberikan kepastian yang tegas.

9. Analisis Artikel Berita 19

Judul : Unggahan Raffi Ahmad soal Revisi UU Pilkada Banjir
Kritikan

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Presenter Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan di tengah selebritas lainnya menyerukan tolak revisi UU Pilkada.

Table 4.19 Analisis Skripsi 19

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Belum Tentu Batal, Revisi UU Pilkada Berpeluang Dilanjutkan DPR Periode 2024-2029
	Lead	Unggahan selebritas Raffi Ahmad yang menyuarakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada mendapat kritikan keras dari berbagai pihak Lead ini langsung mengarahkan perhatian pembaca pada reaksi negatif yang diterima Raffi Ahmad. Kata-kata seperti "kritikan keras" menciptakan kesan bahwa opini Raffi Ahmad kontroversial dan tidak disambut baik oleh banyak pihak.
	Latar Informasi	"Sejumlah pihak menilai Raffi Ahmad tidak memahami substansi revisi UU Pilkada dan justru menambah kerumitan dengan komentar yang tidak tepat." Framing Latar Informasi Latar informasi ini mengungkapkan alasan kritikan yang muncul, yakni ketidaktahuan Raffi Ahmad terhadap substansi revisi UU Pilkada. Framing ini memperjelas bahwa kritik yang datang dari masyarakat berfokus pada kurangnya pemahaman Raffi tentang isu yang diangkat. resenter Raffi Ahmad:
	Kutipan Sumber	1. "Pengesahan revisi UU Pilkada yg direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal

		<p>dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,”</p> <p>2. “Batalnya pengesahan revisi UU Pilkada pada saat awal rapat paripurna jam 10.00 WIB di pagi hari,”</p>
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	"Meskipun mendapat banyak kritik, Raffi Ahmad tetap mempertahankan pandangannya dan berjanji akan terus mendalami isu politik lebih dalam." Framing Penutup
		Penutupan artikel ini menekankan keteguhan Raffi Ahmad meskipun mendapat tekanan, menciptakan kesan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kritik. Hal ini memperkenalkan framing keteguhan hati dan keberlanjutan dalam menyuarakan pendapat meskipun dibanjiri kritik.
Skrip	What	Unggahan Raffi Ahmad yang mendukung revisi UU Pilkada dan mendapatkan kritikan keras dari publik.
	Where	Jakarta
	When	23 Agustus 2024
	Who	Raffi Ahmad
	Why	Karena komentar Raffi Ahmad dianggap tidak berdasar dan kurang memahami substansi revisi UU Pilkada, yang memicu kritik dari masyarakat dan pengamat politik.
	How	Raffi Ahmad mengungkapkan dukungannya terhadap revisi UU Pilkada di media sosial, namun

Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak memahami isu yang dibicarakan. Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Rafi ahmad sebagai gambaran bagi pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Berita dengan Judul **Belum Tentu Batal, Revisi UU Pilkada Berpeluang Dilanjutkan DPR Periode 2024-2029** Lead Unggahan selebritas Raffi Ahmad yang menyuarakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada mendapat kritikan keras dari berbagai pihak Lead ini langsung mengarahkan perhatian pembaca pada reaksi negatif yang diterima Raffi Ahmad. Kata-kata seperti "kritikan keras" menciptakan kesan bahwa opini Raffi Ahmad kontroversial dan tidak disambut baik oleh banyak pihak. Latar Informasi "Sejumlah pihak menilai Raffi Ahmad tidak memahami substansi revisi UU Pilkada dan justru menambah kerumitan dengan komentar yang tidak tepat." Framing Latar Informasi Latar informasi ini mengungkapkan alasan kritikan yang muncul, yakni ketidaktahuan Raffi Ahmad terhadap substansi revisi UU Pilkada. Framing ini memperjelas bahwa kritik yang datang dari masyarakat berfokus pada kurangnya pemahaman Raffi tentang isu yang diangkat. Kutipan Sumber resenter Raffi Ahmad: 1. "Pengesahan revisi UU Pilkada yg direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," 2. "Batalnya pengesahan revisi UU Pilkada pada saat awal rapat paripurna jam 10.00 WIB di pagi hari," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup

"Meskipun mendapat banyak kritik, Raffi Ahmad tetap mempertahankan pandangannya dan berjanji akan terus mendalami isu politik lebih dalam." Framing Penutup Penutupan artikel ini menekankan keteguhan Raffi Ahmad meskipun mendapat tekanan, menciptakan kesan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kritik. Hal ini memperkenalkan framing keteguhan hati dan keberlanjutan dalam menyuarakan pendapat meskipun dibanjiri kritik.

2. Struktur Skrip

What Unggahan Raffi Ahmad yang mendukung revisi UU Pilkada dan mendapatkan kritikan keras dari publik. Where Jakarta When 23 Agustus 2024 Who Raffi Ahmad Why Karena komentar Raffi Ahmad dianggap tidak berdasar dan kurang memahami substansi revisi UU Pilkada, yang memicu kritik dari masyarakat dan pengamat politik. How Raffi Ahmad mengungkapkan dukungannya terhadap revisi UU Pilkada di media sosial, namun mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak memahami isu yang dibicarakan.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Rafi ahmad sebagai gambaran bagi pembaca

10. Analisis Artikel Berita 20

Judul : Serba-Serbi Demo Penolakan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ringkasan : Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan Gedung DPR RI

Table 4.20 Analisis Berita 20

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Serba-Serbi Demo Penolakan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI
	Lead	Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan Gedung DPR RI
	Latar Informasi	Demo tersebut pecah setelah DPR RI berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada. Beragam kejadian menarik mewarnai aksi unjuk rasa kemarin. Berikut rangkuman serba-serbi demo penolakan revisi UU Pilkada.
	Kutipan Sumber	aktivis '98 Alif Iman <ol style="list-style-type: none"> 1. "Sementara Badan Legislasi DPR yang merancang UU adalah putusan yang tidak konstitusional, amka tidak ada satu kata yang mesti kita teriakkan, kecuali lawan!," 2. "Lalu, kita mendapat kenyataan bahwa itu (putusan MK) coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya wakil kita semua hari ini. Lantas, Anda (anggota DPR) yang di dalam ini (Gedung DPR), wakil siapa?"
		Abdur Arsyad <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kita kawal putusan MK, harusnya yang

		ditetapkan MK seperti putusan pilpres beberapa bulan lalu, harusnya itu pula yang harus KPU dan (DPR) taati,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan
	Penutup	Penutupan artikel Meski begitu, rombongan Habiburokhman terus jalan ke arah mobil komando dan naik ke atasnya. Masih dengan dilempari botol, Habiburokhman mulai berorasi. Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta
Skrip	What	25 Agustus 2024
	Where	Massa Pendemo
	When	Karena pengesahan PKPU Pilkada 2024 dianggap bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi, serta dipandang mengabaikan prinsip-prinsip hukum dasar.
	Who	mereka melakukan aksi demo sambil membawa poster bertulisan "Indonesia Darurat Demokrasi, Matinya Demokrasi Indonesia", "Lawan Komplotan Pembegalan Konstitusi", dan "Tolak Pilkada Akal-Akalan Penguasa: Kawal Putusan Mk".
	Why	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan
	How	
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	

Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Sejumlah massa melakukan aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.
----------------	-----------------------------------	--

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Serba-Serbi Demo Penolakan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI Lead Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan Gedung DPR RI Latar Informasi Demo tersebut pecah setelah DPR RI berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada. Beragam kejadian menarik mewarnai aksi unjuk rasa kemarin. Berikut rangkuman serba-serbi demo penolakan revisi UU Pilkada. Kutipan Sumber aktivis '98 Alif Iman 1. "Sementara Badan Legislasi DPR yang merancang UU adalah putusan yang tidak konstitusional, amka tidak ada satu kata yang mesti kita teriakkan, kecuali lawan!," 2. "Lalu, kita mendapat kenyataan bahwa itu (putusan MK) coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya wakil kita semua hari ini. Lantas, Anda (anggota DPR) yang di dalam ini (Gedung DPR), wakil siapa?" Abdur Arsyad 1. "Kita kawal putusan MK, harusnya yang ditetapkan MK seperti putusan pilpres beberapa bulan lalu, harusnya itu pula yang harus KPU dan (DPR) taati," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari wartawan Penutup Penutupan artikel Meski begitu, rombongan Habiburokhman terus jalan ke arah mobil komando dan naik ke atasnya. Masih dengan dilempari botol, Habiburokhman mulai berorasi.

2. Struktur Skrip

What Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan Gedung DPR RI, Where Jakarta When 25 Agustus 2024 Who Massa Pendemo Why Karena pengesahan PKPU Pilkada 2024 dianggap bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi, serta dipandang mengabaikan prinsip-prinsip hukum dasar. How mereka melakukan aksi demo sambil membawa poster bertulisan "Indonesia Darurat Demokrasi, Matinya Demokrasi Indonesia", "Lawan Komplotan Pembegalan Konstitusi", dan "Tolak Pilkada Akal-Akalan Penguasa: Kawal Putusan Mk".

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut sudah berurut dimulai dari informasi terkait dari apa yang sedang terjadi hingga penyelesaian yang dilakukan.

4. Struktur Retoris

Terdapat foto Sejumlah massa melakukan aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

4.3 Hasil Analisis Framing Pemberitaan di portal berita Detik.com dan Kompas.com

Dari hasil penelitian pada artikel Derik.com secara keseluruhan artikel ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh detik.com mengenai pemberitaan polemik revisi undang-undang pemilihan kepala daerah 2024, peneliti menemukan bahwa pembingkaiian utama yang berusaha dibentuk oleh detik adalah detail dari segi informasi, sumber informasi dan pandangan dari masyarakat pendemo.

Hal ini dapat dibuktikan dari inti semua pemberitaan yang dianalisis menyatakan hal seperti itu. Pada struktur sintaksi berisi mengenai bagaimana

pemerintah dan masyarakat pendemo memberikan tanggapan serta opini terkait dengan revisi uu pilkada 2024, sumber-sumber yang digunakan merupakan orang-orang yang berperan penting dalam pengesahan dan revisi dari undang-undang itu sendiri.

Tentunya hal ini dapat memberikan pandangan bagi pembaca terkait, bagaimana intensi yang diberikan pemerintah dari sumber yang berbeda-beda. Lead dari detik memberikan informasi yang cukup jelas bagi pembaca selaras dengan judul dari berita itu sendiri, sehingga pembaca memiliki rasa ingin tahu dan ingin membaca pemberitaan tersebut hingga selesai, kutipan sumber yang dimuat oleh detik memberikan informasi utama serta terdapat penekanan dan penegasan terkait pemberitaan revisi uu pilkada 2024.

Mengenai struktur skrip dalam memisahkan sebuah berita, dalam pemberitaan ini hampir sama dengan struktur sintaksi yaitu berisi mengenai bagaimana pendapat dan tanggapan dari sumber terkait dengan polemik revisi uu pilkada 2024, opini-opini dari para sumber dengan jelas dituliskan oleh penulis artikel dari detik sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi baru terkait dengan revisi uu pilkada.

Pada struktur retorik detik.com sering kali memberikan gambar atau foto dengan detail sesuai dengan isi atau headline berita sehingga pembaca dapat menikmati visual dan menjadi penegasan dari pemberitaan tersebut.

Sedangkan hasil dari rangkuman pada artikel kompas.com secara keseluruhan artikel ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh kompas.com mengenai polemik revisi uu pilkada adalah tanggapan dan pandangan lebih luas seperti terdapat beberapa artis yang menjadi headline berita dari kompas.com seperti " Unggahan Raffi Ahmad soal Revisi UU Pilkada Banjir Kritis " disini sudah menjelaskan bagaimana kompas memberikan pemberitaan dari bagian entertainment tak hanya tanggapan dari pemerintahan tetapi terdapat juga pandangan dari artis atau entertainment di Indonesia. Pada lead yang diberikan oleh kompas memberikan informasi yang jelas bagi pembaca selaras dengan judul yang diberikan sehingga pembaca merasa ingin membaca hingga selesai.

Mengenai struktur skrip dalam mengisahkan sebuah berita, dalam pemberitaan hampir sama dengan unsur sintaksi yaitu berisikan bagaimana

tanggapan dari berbagai narasumber. Struktur retorik pada Kompas pemilihan gambar dan foto yang sesuai dengan judul headline sehingga pembaca akan mendapatkan pengalaman membaca dengan visual yang sesuai.

Dapat dikatakan bahwa Kompas memiliki pembingkai berita yang menonjolkan pandangan serta segi informasi yang lebih luas hal ini dapat dibuktikan dari beberapa judul serta struktur sintaksis dari isi berita, sedangkan detik.com memiliki pembingkai berita yang terfokus pada pandangan atau tanggapan dari pemerintah dan masyarakat pendemo.

Selanjutnya penelitian ini sejak awal ditujukan untuk menganalisis pembingkai di portal berita detik.com dan Kompas.com terkait dengan pemberitaan polemik revisi UU Pilkada 2024, dari hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa kedua media tersebut memiliki framing yang berbeda-beda serta sudut pandang yang berbeda dalam membingkai sebuah peristiwa yang sama pada struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pembingkai kedua situs berita online tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.21 Perbandingan Pembingkai dari Detik dan Kompas

Perangkat Framing	Detik.com	Kompas.com
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> Pemilihan kata untuk judul berita yang informatif dan faktual <i>Lead</i> mencakup keseluruhan inti berita Kutipan sumber yang tidak banyak disajikan cenderung narasumber yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> Pemilihan kata judul berita yang lugas dan memberikan rasa penasaran kepada pembaca sehingga dapat membaca hingga selesai <i>Lead</i> yang digunakan deskriptif menjelaskan dengan jelas isi dari berita Terdapat sedikit pernyataan dari narasumber dan cenderung berulang
	Kementerian <ol style="list-style-type: none"> Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu Sekjen DPR Indra Iskandar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad 	Kementerian <ol style="list-style-type: none"> Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco
		Kepresidenan <ol style="list-style-type: none"> Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid
		Artis

Skrip	1. Berita memuat 5W+1H dan lebih menonjolkan what yaitu berisi mengenai apa yang terjadi pada pemberitaan yang mudah dimengerti	1. Raffi Ahmad 1. Berita 5W+1H yang menonjolkan what berisi mengenai informasi yang sesuai dengan headline
Tematik	1. Berita yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait revisi uu pilkada	1. Berita yang disusun memberikan bagaimana tanggapan dari narasumber
Retoris	1. Foto sesuai dengan judul dan isi berita serta dapat memberikan penekanan kepada pembaca berita	1. Foto sesuai dengan judul dan isi berita serta dapat memberikan penekanan kepada pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Dari kedua media yang telah dianalisis, telah ditemukan perbedaan *framing* terhadap keduanya, detik berusaha untuk memberikan informasi terkait dengan polemik revisi uu pilkada 2024 dari sumber pemerintahan dan masyarakat pendemo yang mempunyai andil dari kasus tersebut, sedangkan Kompas memiliki framing yang menonjolkan seluruh aspek narasumber pemerintah, artis dan masyarakat pendemo.